

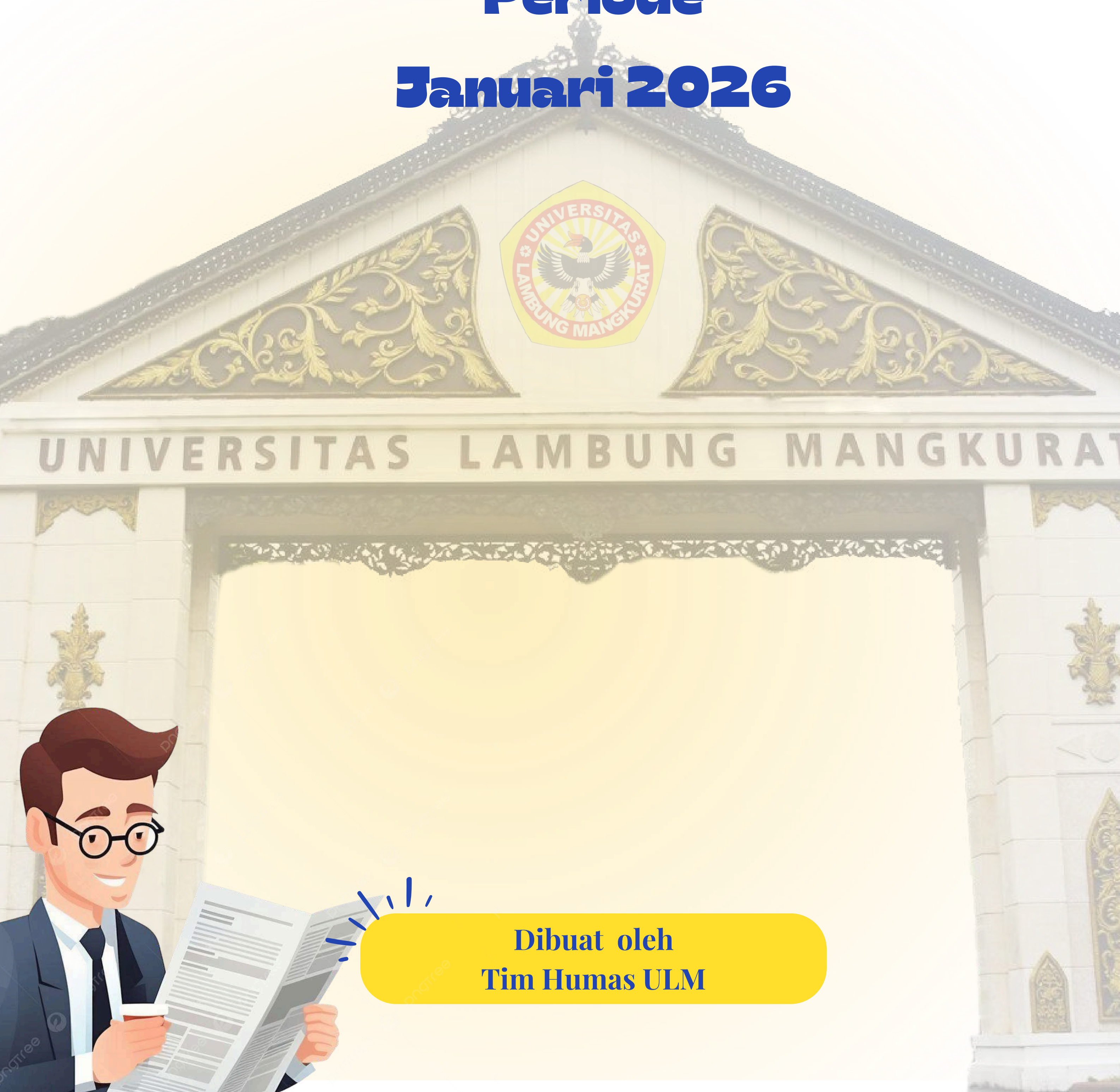


DIKTISAINTEK
BERDAMPAK



KLIPING

Periode
Januari 2026



Dibuat oleh
Tim Humas ULM



Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

Opini Dosen /
Mahasiswa

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Banjarmasin Post

6 Januari 2026





Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

Opini Dosen /
Mahasiswa

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Banjarmasin Post

7 Januari 2026





Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

Opini Dosen /
Mahasiswa

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Banjarmasin Post

7 Januari 2026

Intel Asmara Berefek Panjang

BANJARMASIN, BPOST - Fenomena penggunaan jasa "intel asmara" di Kalimantan Selatan, yang dapat ditemukan di media sosial, rupanya diawali dengan rasa cemas. Bukan cemas biasa, tapi rasa tidak aman dalam hubungan, yang perlahan menumpuk dan tak pernah benar-benar dibicarakan.

Psikolog Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Firdha Yuse-rina, menilai keputusan seseorang menyewa jasa "intel" untuk memantau pasangan biasanya berangkat dari kondisi emosional yang rapuh. Perasaan itu bisa muncul karena pengalaman masa lalu, komunikasi yang tidak sehat, atau perubahan sikap pasangan yang tak pernah dijelaskan secara terbuka.

"Biasanya karena orang itu lagi merasa cemas dan nggak merasa aman dalam hubungannya. Bisa karena pernah diselingkuhi, pernah dikhianati, komunikasi sama pasangan yang nggak sehat, atau sedang berada dalam hubungan yang toxic. Kadang juga karena ada perubahan sikap pasangan yang bikin kepikiran," ujar Fird-

● Hal 5 kol 1-3

Intel...

● Sambungan Hal 1

ha, Selasa (16/12).

Dalam kondisi seperti itu, rasa curiga tumbuh lebih cepat daripada rasa percaya. Hubungan yang seharusnya menjadi ruang aman justru berubah menjadi sumber kecemasan. Menurut Firdha, penggunaan jasa intel asmara sering kali menjadi tanda bahwa rasa kepercayaan dalam hubungan sedang bermasalah.

"Sering kali, iya. Ini tanda kalau rasa percaya di hubungan itu lagi terganggu. Hubungannya sudah nggak aman secara emosional, karena rasa curiga lebih besar dari rasa percaya. Akhirnya orang lebih memilih mengintai dan mengontrol, daripada mengobrol dan menyampaikan apa yang dirasakan," jelasnya.

Masalahnya, kelegaan yang didapat dari hasil pemantauan itu jarang bertahan lama. Mengetahui keberadaan pasangan, siapa yang ditemui, atau aktivitas apa yang dilakukan memang bisa menjawab rasa penasaran sesaat. Namun

di balik itu, ada efek jangka panjang yang justru lebih berbahaya bagi hubungan. "Lama-lama justru makin memicu overthinking dan makin sulit percaya," kata Firdha.

Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pihak yang memantau. Bagi pasangan yang menjadi objek pengintaian, praktik ini bisa melukai secara emosional. Rasa dikhianati, tidak dipercaya, dan tidak dihargai bisa muncul, bahkan tanpa mereka pernah tahu bahwa dirinya sedang diawasi.

Jalan paling sehat, menurutnya, tetap kembali pada komunikasi yang jujur dan dewasa.

Jika komunikasi sudah buntu dan hubungan mulai diwarnai saling curiga dan saling mengawasi, Firdha menyarankan pasangan mempertimbangkan bantuan profesional, terutama bila hubungan tersebut ingin dibawa ke jenjang yang lebih serius.

Rizki Apriliyanti, M.Med. Kom, Ahli Komunikasi Digital Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin (Uniska MAB), menjelaskan fenomena "intel

asmara" sebenarnya bukan hal baru. Sejak dulu, praktik saling mengawasi dalam hubungan sudah ada. Bedanya, sekarang praktik itu hadir dalam bentuk digital. Lewat media sosial, aktivitas seseorang bisa dipantau dari jarak jauh, mulai dari unggahan, komentar, hingga interaksi dengan orang lain.

Sebelum ada media sosial, pengawasan dilakukan secara langsung, misalnya dengan meminta orang lain mengikuti atau memantau aktivitas pasangan. Sekarang, hampir semua orang memiliki jejak digital. Dari unggahan media sosial saja, seseorang bisa diamati tanpa harus bertemu atau bertatap muka.

Biasanya seseorang mengalihkan pemantauan ke pihak ketiga karena ada perasaan tidak berani menerima kenyataan dari realita yang nantinya didapat tentang pasangan. Padahal, hubungan yang sehat seharusnya dibangun dari komunikasi yang terbuka dan rasa saling percaya, bukan dari memantau dan mengawasi secara diam-diam di ruang digital. (sul)



Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

Opini Dosen /
Mahasiswa

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Banjarmasin Post

8 Januari 2026

Maksimal Layani Masyarakat

TERPANGGIL untuk menjadi dokter setelah adik bungsu saya meninggal. Ia pun bertekad harus ada di keluarga yang punya kemampuan dalam bidang kesehatan.

Setelah menjalani profesinya, ia juga melihat ada beberapa penyakit yang perlu penanganan dokter spesialis, sehingga ia pun menempuh pendidikan lanjutan agar mampu menguasai bidang keilmuan.

Sekarang, ia menjabat Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Balangan. Lantas apa langkah dan programnya dalam bidang kesehatan di masyarakat? Berikut petikan wawancaranya.

Bisa diceritakan latar belakang kehidupan dan apa yang menginspirasi Anda memilih profesi dokter?

Saya lahir dari kedua orangtua yang bekerja sebagai PNS. Jadi, saat masih sama cita-cita awal saya adalah seperti orangtua menjadi birokrat.

Sampai ada satu kejadian di mana sampai meninggalnya adik saya yang paling kecil, di sana saya menanamkan dalam hati saya, harus menjadi seorang dokter yang nantinya bisa membantu kesehatan keluarga maupun masyarakat luas.

Mengapa tertarik menekuni bidang THT Bedah Kepala dan Leher?

THT adalah bidang kedokteran yang berkesan bagi saya, banyak saya menemukan penyakit-penyakit di bidang THT yang unik pada saat menjadi dokter umum dan masih jarang dokter yang menggeluti bidang tersebut, terutama di daerah hulu sungai.

Nilai atau prinsip apa yang paling dipegang dalam menjalani profesi sebagai dokter?

Menurut saya nilai profesionalisme paling penting karena berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan integritas kita dalam pelayanan, selain itu nilai kemauan juga tidak kalah pentingnya.

Apakah ada tantangan terbesar selama menempuh pendidikan kedokteran di Universitas Lambung Mangkurat?

Alhamdulillah, selama pendidikan tidak ada hal-hal yang dirasa sangat memberatkan, karena semua harus dilasari niat.

Walaupun kegiatan perkuliahan, praktikum dan lain-lain, jika disertai dengan niat yang kuat, insya Allah semua akan lebih mudah.

Bagaimana pengalaman melanjutkan pendidikan spesialis THT-BKL di Universitas Hasanuddin Makassar?

Makassar adalah kota yang penuh perjuangan bagi saya. Pendidikan spesialis saya

memang tidak mudah, saya meninggalkan orangtua yang saat itu sedang sakit di Balangan, jauh dari keluarga dan banyak masalah internal lain yang saya alami saat pendidikan.

Lika-liku kehidupan residen memang tidak mudah dan lebih berat dari yang saya bayangkan. Alhamdulillah saya di sana banyak bertemu dengan orang baik dan teman-teman yang selalu mendukung saya dalam menjalani kehidupan residen.

Saya juga selalu ingat perkataan kedua orangtua saya untuk selalu berusaha yang terbaik dalam pendidikan sehingga bisa cepat kembali ke kampung halaman.

Alhamdulillah hal itu terakumulasi, saya mendapatkan predikat lulusan terbaik dan bisa menyelesaikan pendidikan lebih cepat dari yang seharusnya.

Bagaimana pengalaman saat pertama kali bertugas sebagai dokter umum di RSUD Balangan?

Saya pertama kali bertugas di RSUD Balangan pada 2011. Pada saat itu, Rumah Sakit Balangan masih kurang sekali tenaga kesehatannya, dalam hal ini tidak adanya tenaga dokter spesialis.

Segala kasus penyakit diupayakan dilayani secara maksimal di rumah sakit sebelum dilakukan rujukan ke rumah sakit yang lebih lengkap.

Alhamdulillah sekarang ini RS Duta Kandang sudah berkembang sangat jauh dan lengkap untuk spesialisasi.

Sebagai dokter spesialis THT-BKL yang praktik di beberapa rumah sakit, tantangan apa yang paling sering dihadapi di lapangan?

Tantangan dihadapi adalah jarak tempuh yang memakan waktu, tetapi alhamdulillah masih bisa melakukan pelayanan yang optimal dengan pengaturan jadwal praktek yang bisa disesuaikan.

Apa yang mendorong Anda aktif berorganisasi sejak menjadi pengurus KNPI?

Saat berorganisasi, kolega tidak hanya dari bidang kesehatan, jadi akan banyak insight dari aspek lain.

Inovasi apa yang perlu dikembangkan pada kualitas layanan kesehatan masyarakat?

Saya rasa perlu dikembangkan digitalisasi pelayanan kesehatan sejak dari tingkat pelayanan dasar.

Apa pesan untuk dokter muda dan mahasiswa kedokteran di Kalsel?

Pesan kepada dokter muda dan mahasiswa kedokteran di Kalsel, tetap meluruskan niat untuk menolong sesama dalam peningkatan kesehatan masyarakat. (da)

Dengar Keluhan Warga

SETELAH Indra Irawan terpilih sebagai Ketua IDI Balangan, program prioritasnya adalah pemerataan kesehatan di Bumi Sanggam, walaupun saat ini fasilitas ambulans desa dari Pemda sudah sangat membantu warga.

BIODATA

Nama : dr Indra Irawan SpTHT-BKL
Lahir : Amuntai 25 September 1985
Alamat : Kompleks Cahaya Muhibbin Gang Al Malik Nomor 2 Paringin, Balangan

Pendidikan

- Fakultas Kedokteran ULM Banjarmasin
- Program Magister studi ilmu kesehatan telinga hidung tenggorok bedah kepala dan leher Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar

Pengalaman Organisasi

- Pengurus KNPI Balangan 2014-2016
- Anggota Perhati Kalsel 2021-sekarang
- Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Balangan 2024-2027

Riwayat pekerjaan

- Dokter Umum Rumah Sakit Balangan 2011-2017
- Dokter Umum RS Pertamina Tabalong 2012-2013
- Dokter spesialis THTBKI di RSPB Amuntai 2022-2024
- Dokter spesialis THTBKL di RSDKH Balangan 2021-sekarang
- Dokter spesialis THTBKL di RSHD Barabai 2022-sekarang



Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

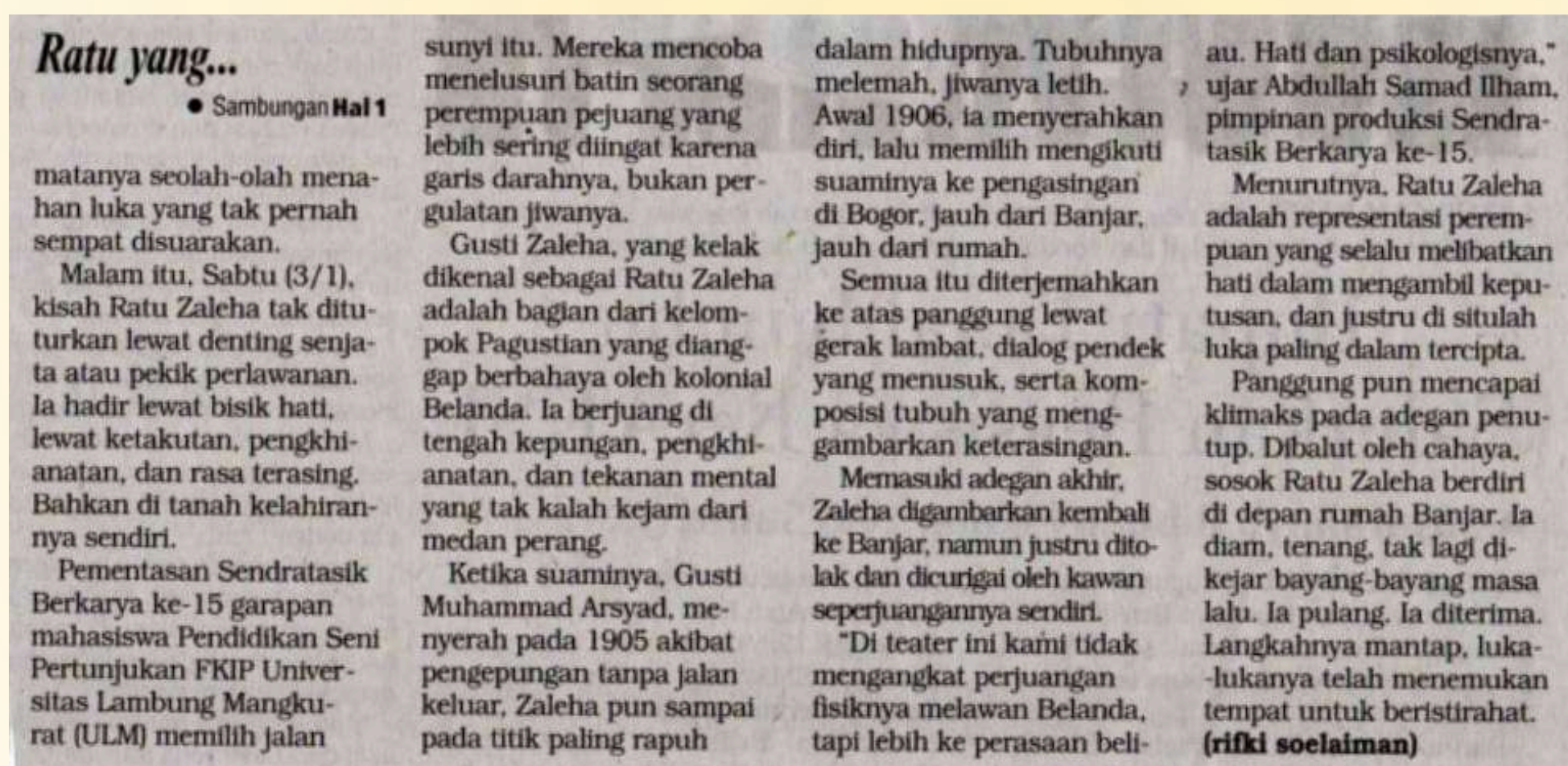
Opini Dosen /
Mahasiswa

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Banjarmasin Post

9 Januari 2026





Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

Opini Dosen /
Mahasiswa

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Banjarmasin Post

9 Januari 2026

Minta Tranparansi Proses Penyidikan

● Aksi Kamisan Soroti Kasus Polisi Bunuh Mahasiswi ULM

MARTAPURA, BPOST - Social Justice Institute Kalimantan (SJIK) bersama Jaringan Masyarakat Sipil dan Solidaritas menggelar Aksi Kamisan menyuarakan keprihatinan mendalam atas kasus pembunuhan ZD, mahasiswi ULM berusia 20 tahun, yang dilakukan oleh seorang anggota aktif Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di Kalimantan Selatan.

Pernyataan sikap tersebut disampaikan melalui Gerakan Udara Aksi Kamisan Bersuara yang dinarasikan oleh Wira Surya Wibawa, Kamis (8/1).

Dalam keterangannya, SJIK menilai peristiwa ini tidak dapat dipandang sebagai kejahatan individual semata, melainkan mencerminkan persoalan serius dalam penegakan keadilan, rela-

si kuasa, serta perlindungan hak asasi manusia, khususnya terhadap perempuan.

Menurut SJIK, ketika aparat penegak hukum justru menjadi pelaku kekerasan paling ekstrem berupa pembunuhan, maka kepercayaan publik terhadap institusi hukum berada dalam ancaman nyata.

Oleh karena itu, gerakan udara ini digagas sebagai bentuk perlawanan sipil non-kekerasan untuk menjaga ingatan publik agar kasus tersebut tidak dikaburkan, dilupakan, atau diselesaikan secara tertutup.

Melalui gerakan ini, SJIK dan jaringan solidaritas juga menghimpun dukungan masyarakat

● Hal 11 **kol 1-3**

Minta Tranparansi...

● Sambungan **Hal 9**

luas dengan memanfaatkan poster digital, unggahan kolaboratif, serta narasi di ruang publik.

Mereka menegaskan bahwa nyawa korban tidak boleh dikalahkan oleh pangkat, seragam, maupun institusi, serta menekankan bahwa perjuangan keadilan tidak hanya berlangsung di ruang sidang, tetapi juga di ruang publik.

Dalam pernyataan sikapnya, SJIK menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap pelaku melalui peradilan pidana umum dan

proses etik internal Polri, transparansi penuh dalam setiap tahapan penyidikan dan persidangan, serta pelibatan lembaga pengawas independen seperti Komnas HAM guna mencegah konflik kepentingan dan impunitas.

Selain itu, mereka juga menuntut perlindungan serta pemulihan hak-hak keluarga korban, termasuk pendampingan hukum dan psikososial, serta penghentian budaya kekerasan dan relasi kuasa yang bersifat abusif di tubuh aparat penegak hukum.

SJIK turut mengajak masyarakat, mahasiswa, aktivis, dan jurnalis untuk menunjukkan solidaritas dengan mengunggah poster

bertema "Keadilan untuk ZD", berkolaborasi dengan akun Aksi Kamisan, Borneo Melawan, dan Social Justice Institute Kalimantan, serta menggunakan narasi yang berpihak pada korban dan menolak normalisasi kekerasan.

"Diam adalah bentuk lain dari pembiaran. Bersuara adalah bagian dari perjuangan keadilan," demikian pernyataan yang disampaikan dalam gerakan tersebut.

Kasus pembunuhan ZD disebut sebagai ujian moral bagi negara dan institusi hukum, dengan penegasan bahwa tidak ada keadilan tanpa transparansi dan tidak ada perdamaian tanpa pertanggungjawaban. **(lis)**



Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

Opini Dosen /
Mahasiswa

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Radar Banjarmasin

9 Januari 2026

Membedah Wacana Kerja di Mall

BARU-BARU ini ada wacana pemerintah melalui Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengenai pemberlakuan atau dorongan Work From Mall (WFM). Wacana ini kemudian menjadi hal yang menarik. Karena ide ini sebenarnya tampak sebagai pragmatis strategis yang tujuannya untuk menghidupkan kembali denyut ekonomi ritel yang sempat lesu pascapandemi sekaligus juga salah satu cara untuk mengakomodir budaya kerja fleksibel yang kini menjadi norma baru di masyarakat. Namun, jika wacana ini di bedah lebih dalam dengan menggunakan pisau analisis sosiologis, Work From Mall bukan hanya perkara memindahkan laptop dari meja kerja ke meja kafe. Ini adalah fenomena pergeseran makna ruang yang fundamental. Dari fenomena ini memaksa kita meninjau kembali bagaimana kita mendefinisikan "tempat kerja" dan "tempat belanja".

Mal dan Produksi Ruang
Dalam perkotaan sosiologis, mall secara tradisional dipahami sebagai "katedral konsumsi". Yaitu ruang yang didesain sedemikian rupa untuk merayu pengunjung agar membelanjakan uangnya, kita tanpa sadar dirayu dengan arsitektur, pencahayaan, hingga tata letak gerai. Itu semua adalah mekanisme kontrol halus untuk mendorong konsumsi.

Sosiolog Prancis Henri Lefebvre dalam karyanya yang monumental, *The Production of Space*, mengingatkan kita

bahwa ruang bukanlah wadah kosong yang statis. Ruang adalah produk sosial. Lefebvre membagi ruang menjadi tiga dimensi dialektis, yang sangat relevan untuk membedah fenomena WFM ini. Pertama, adalah Representasi Ruang (Ruang yang dikonsepkan). Ini adalah ruang yang dirancang oleh arsitek, pengembang atau pemerintah. Dalam konteks Mall, konsep aslinya jelas mall sebagai ruang komersial untuk hiburan dan belanja. Namun WFM telah memunculkan dimensi kedua dan ketiga Lefebvre di mana ada Praktik Spasial dan Ruang Hidup. Ketika seorang pekerja membawa laptop, melakukan pertemuan berani, dan bekerja berjam-jam di sebuah kedai kopi dalam Mall, saat itu tanpa sadar mereka sedang melakukan "pembangkangan" kecil pada konsep asli dari Mall itu sendiri.

Masyarakat, melalui rutinitas barunya, telah mengubah Mall yang tadinya murni konsumsi ruang menjadi ruang hybrid. Di dalam teori Lefebvre bekerja: pengguna ruang (pekerja) secara aktif memproduksi ulang makna mall. Mall tidak lagi hanya sekedar tempat untuk menghabiskan uang (Konsumsi), namun juga tentang menghasilkan nilai ekonomi melalui pekerjaan (produksi).

Ambisi Work From Mall dan Kaburnya Batas Privat dan Publik
Sekarang mari coba bayangkan skenarionya, di layar laptop, Anda sedang berdebat serius dengan atasan soal target kinerja via Zoom, namun



Oleh
N'MAH, S.SOS., M.SOSIO*

telinga Anda sayup-sayup menangkap jingle promosi dari gerai pakaian di sebelah, atau riuh rendah para remaja yang sedang hangout. Mungkin inilah gambaran nyata dari apa yang disebut Sosiolog Ray Oldenburg sebagai pergeseran fungsi *The Third Place*.

Secara teori, Oldenburg mendefinisikan *Third Place* seperti kafe atau taman sebagai ruang netral untuk melepas penas, sebuah antitesis dari rumah (ruang privat) dan kantor (ruang Korporat). Namun, kinit tren work from mall (WFM) telah mengacak-acak resolusi yang mapan ini. Mall kini berada dalam ambang batas yang membingungkan: ia bukan kantor sepenuhnya, tapi juga bukan lagi murni tempat rekreasi.

Ketika kita memutuskan untuk membuka laptop di kedai kopi dalam Mall,

kita sebenarnya sedang melakukan privatisasi ruang publik secara temporer. Kita menciptakan "gelembung fokus" ditengah keramaian. Namun, ada ironis sosiologi disini dimana kebebasan yang kita rasakan itu sebenarnya semua. Mengapa semu? karena permulaan ini hadir dengan label harga. Yang ditinjau dalam kacamata sosiologi ekonomi, kita tidak sekedar "numpang kerja". Namun sejatinya kita sedang membayar sewa meja kantor secara eceran melalui harga segelas latte yang overpriced atau camilan yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Terjadi komodifikasi kenyamanan bekerja. Hak untuk duduk dan menggunakan Wi-Fi divalidasi oleh kemampuan kita untuk terus menerus mengkonsumsinya.

Akibatnya, batas mental kita pun ikut kabur, jika dulu Mall adalah sebuah tempat pengungsi dari tekanan pekerjaan, kini Mall justru menjadi tempat di mana tekanan itu kita bawa sera. Kita menormalisasi tumpang-tindih antara waktu istirahat dan waktu kerja. Kita mungkin merasa modern dan fleksibel dengan bekerja di sela-sela etalase toko, tapi tanpa sadar, kita sedang menghilangkan ruang istirahat. Mall tidak lagi menjadi tempat untuk "hilang" sejenak dari kewajiban, melainkan menjadi perpanjangan tangan kantor yang berbalut pendingin udara dan aroma kopi.

Segregasi Sosial Baru
Selanjutnya tantangan sosiologis lainnya adalah potensi eksklusivitas.

Pertanyaan yang muncul ialah Siapa yang bisa melakukan Work From Mall? tentu saja buka pekerja kerah biru, bukan buruh pabrik atau pedagang pasar. WFM adalah hal istimewa kelas menengah-atas dan pekerja berkerah putih. Mendorong WFM sebagai kebijakan publik yang berisiko mempertegas segregasi sosial. Mall yang pada hakikatnya menjadi ruang publik yang inklusif, akan semakin terstratifikasi antara mereka yang bekerja santai di kafe berpendingin udara dan mereka yang melayani kebutuhan tersebut.

Kesimpulan

Rencana pemerintah untuk menggalakan Work from Mall memang cerdas secara ekonomi jangka pendek untuk menyelamatkan sektor ritel. Namun, kita tidak boleh naif melihatnya hanya sebagai tren gaya hidup.

Meminjam pemikiran Lefebvre, WFM adalah bukti bahwa masyarakat memiliki kekuatan untuk mengubah fungsi ruang. Namun, kita harus berhati-hati agar "ruang hidup" yang baru ini tidak mempengaruhi kita dalam siklus konsumsi tanpa henti atas nama produktivitas. Mall boleh saja menjadi kantor baru, tapi jangan sampai kirimkan ini justru mengikis batasan antara bekerja untuk hidup, dan hidup hanya untuk bekerja sembari berbelanja. (*/al/ram)

*Dosen Program Studi Sosiologi
Universitas Lambung Mangkurat*



Universitas
LAMBUNG MANGKURAT
Waja Sampai ka Puting



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK



Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

Opini Dosen /
Mahasiswa

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Radar Banjarmasin

12 Januari 2026





Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

**Opini Dosen /
Mahasiswa**

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Banjarmasin Post

13 Januari 2026

Perlu Perbaikan Desain

MARAKNYA pencurian besi tutup gorong-gorong di kota ini sebagai bukti lemahnya pengelolaan infrastruktur mikro dan perlindungan aset publik.

Fenomena tersebut tidak hanya mencerminkan tindak kriminal, tetapi juga menunjukkan adanya tekanan sosial ekonomi, rantai pasar logam rongsok yang aktif, serta standar desain utilitas kota yang belum memadai.

Menurutnya, kerentanan fasilitas publik ini terutama disebabkan oleh nilai ekonomis besi di pasar barang rongsok yang memberi insentif pencurian. Desain tutup gorong-gorong yang belum dilengkapi sistem pengunci, engsel permanen, atau baut anti-tamper membuatnya mudah dilepas.

Minimnya kontrol ruang publik, seperti penerangan jalan yang kurang, tidak adanya kamera pengawas di titik strategis, serta lemahnya penegakan hukum terhadap penadah, dinilainya sama-



**Dr Eng Akbar
Rahman ST MT**
Pengamat Tata Kota ULM

BERKAWA

rongsok. Namun, beton memiliki kelemahan berupa berat, mudah retak, dan kurang cocok untuk ruas jalan dengan kendaraan berat.

Alternatif material lain yang dinilai lebih efektif

kin memperkuat rantai pencurian.

Dampak kehilangan tutup gorong-gorong terhadap keselamatan warga dinilai serius. Lubang yang terbuka berpotensi menyebabkan kecelakaan bagi pengendara motor, sepeda, maupun pejalan kaki.

Dari sisi lalu lintas, pengendara sering bermanuver mendadak untuk menghindari lubang, sehingga mengganggu kelancaran arus kendaraan dan meningkatkan risiko tabrakan.

Selain itu, lubang terbuka memudahkan sampah masuk ke saluran, memperburuk kondisi drainase, dan meningkatkan potensi genangan serta banjir.

Sebagai langkah penanganan, penggantian tutup besi dengan beton dianggap pragmatis karena beton tidak memiliki nilai jual di pasar

antara lain komposit FRP (fiber-reinforced polymer) yang kuat, ringan, anti-korosi, dan tidak bernilai jual, ductile iron dengan sistem pengunci atau desain hybrid yang membuat komponen logam sulit dilepas.

Strategi pencegahan di masa depan menekankan pada perbaikan desain dengan sistem penguncian, engsel permanen, baut anti-tamper, serta pemilihan material yang tidak menarik untuk dijajah.

Dari sisi pengawasan, penguatan penerangan jalan, pemasangan CCTV di titik strategis, dan sistem pelaporan cepat berbasis aplikasi dinilai penting agar kerusakan atau kehilangan segera ditindak.

Tata kelola aset publik juga dinilai harus lebih responsif dengan inventarisasi yang jelas sehingga kehilangan tidak dibiarkan berlari-lari.

Penting sekali sinergi antara pemerintah kota dan masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab atas standar desain, pengadaan, pemeliharaan, inventarisasi, serta penegakan hukum terhadap penadah barang curian.

Sementara itu, masyarakat berperan sebagai pengawas sosial melalui pelaporan dini ketika terjadi kerusakan atau kehilangan. Dengan adanya rasa memiliki terhadap aset publik, fasilitas kota seperti gorong-gorong akan lebih terlindungi dan tidak lagi dipandang sebagai barang tanpa pemilik. (sal)



Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

Opini Dosen /
Mahasiswa

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Banjarmasin Post

13 Januari 2026

Polisi Pastikan Kebakaran ULM Tak Disengaja

● Hasil Labfor Sebut karena Korsleting

BANJARMASIN, BPOST

- Proses penyelidikan kebakaran Gedung Rektorat Universitas Lambung Mangkurat (ULM), telah selesai dan resmi dihentikan.

Polisi memastikan, bahwa tidak ditemukan unsur kesengajaan dalam peristiwa kebakaran tersebut.

Kasatreskrim Polresta Banjarmasin, Kopol Eru Alsepa menjelaskan, penghentian perkara dilakukan setelah hasil uji laboratorium forensik (labfor) keluar.

"Pemeriksaan forensik dilakukan oleh jajaran Polda Jawa Timur, karena saat awal penyelidikan Kalsel belum memiliki fasilitas yang memadai," kata Eru, Senin (12/1).

Diungkapkan Eru, hasil uji forensik menunjukkan sumber api berasal dari korsle-



BPOST/M RAHMADI

KOMPOL ERU ALSEPA

Kasatreskrim Polresta
Banjarmasin

ting listrik.

Kondisi tersebut diperparah oleh banyaknya kertas, serta bahan mudah terbakar yang tersimpan di dalam gedung rektorat.

"Berdasarkan hasil laboratorium forensik, tidak ditemukan indikasi pembakaran yang disengaja," ujarnya.

Ia menjelaskan, saat kejadian gedung rektorat tengah menjalani proses renovasi.

Aktivitas tersebut menyebabkan pemindahan dokumen akademik, ke bagian gedung lain yang tidak direnovasi.

"Pemindahan kertas akademik ke gedung yang tidak direnovasi, memperbesar potensi mudah terbakar," ujarnya.

Menurutnya, meskipun kebakaran me-

● Hal 11 kol 1-3

Polisi Pastikan...

● Sambungan Hal 9

nyebabkan kerusakan cu-

kup signifikan pada gedung rektorat, hasil penyelidikan memastikan peristiwa tersebut murni akibat faktor teknis.

"Jadi tidak ada unsur kesengajaan atau pembakaran yang disengaja dalam kejadian kebakaran gedung rektorat ULM," tegas Eru. (mel)



Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

Opini Dosen /
Mahasiswa

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Barito Post

14 Januari 2026

Dinas PUPR Tabalong Lanjutkan Penyelesaian Jembatan Uwie

Tanjung, BARITO

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong berkomitmen melanjutkan penyelesaian pembangunan jembatan di Desa Uwie, Kecamatan Muara Uya, pasca terdampak bencana banjir beberapa waktu lalu.

Kepala Dinas PUPR

Kabupaten Tabalong Wibawa Agung Subrata mengatakan setelah melalui tahap evaluasi dan perbaikan teknis secara keseluruhan proyek pembangunan jembatan Desa Uwie dapat dilanjutkan pengerjaannya.

"Penyelesaian pembangunan jembatan Uwie kita targetkan rampung Februari

2026, sebelum jadwal pemeriksaan BPK," jelas Wibawa, Senin.

Tertundanya penyelesaian jembatan ini karena terdampak bencana banjir yang menyebabkan kerusakan pada bagian perancah (apar-apar) bukan pada struktur utama jembatan baru.

Selanjutnya pihak pelak-

sana proyek akan meminta rekomendasi teknis dari vendor rangka jembatan untuk memastikan keamanan struktur dan menentukan komponen yang perlu diganti.

"Kita juga melibatkan tenaga ahli dari Universitas Lambung Mangkurat untuk memberikan masukan teknis tambahan," jelas Wibawa.

Sebelumnya akibat arus sungai yang kuat serta tumpukan material sampah pohon menyebabkan fondasi sementara yang digunakan untuk menyangga proses pemasangan rangka jembatan rusak.

"Pihak konsultan perencana, konsultan pengawas, kontraktor, dan seluruh manajemen proyek telah mengevaluasi progres pekerjaan," ungkapnya.

Selain Jembatan Desa Uwie, proyek pembangunan jembatan Gala Gala di Desa Binjai, Kecamatan Muara Uya, juga terkendala kondisi lingkungan dan batas waktu penyelesaian awal Februari 2026.

"Target penyelesaian tetap berpedoman pada perpanjangan waktu maksimal 50 hari dengan denda," tambahnya.

ant



KADIS PUPR Kabupaten Tabalong Wibawa Agung Subrata. (foto: ant)



Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

Opini Dosen /
Mahasiswa

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Radar Banjarmasin

15 Januari 2026

Mahasiswa ULM Perkuat Gerakan Alam Desa Aranio

UNIVERSITAS Lambung Mangkurat (ULM) melaksanakan Program Bina Desa ULM Berdampak sebagai bentuk komitmen perguruan tinggi dalam mendorong pemberdayaan masyarakat desa melalui keterlibatan langsung mahasiswa. Program ini dilaksanakan di Desa Aranio, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, pada Sabtu hingga Senin, 3–5 Januari 2026. Kegiatan tersebut menyasar masyarakat usia produktif dengan tujuan meningkatkan perekonomian desa melalui pemanfaatan bahan alami yang tersedia di lingkungan sekitar secara inovatif dan berkelanjutan.

Program Bina Desa ULM Berdampak dirancang tidak sekadar sebagai kegiatan pengabdian jangka pendek, melainkan sebagai upaya membangun kesadaran dan kapasitas masyarakat desa agar mampu mengelola potensi lokal secara mandiri. Dalam konteks inilah, Desa Aranio dipilih sebagai lokasi pelaksanaan program, mengingat ketersediaan sumber daya alam yang melimpah namun belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat setempat.

Kegiatan ini mengusung tema EcoSquad: Gerakan Inovasi dan Edukasi Lingkungan Berbasis Bahan Alami. Tema tersebut menegaskan pendekatan yang mengintegrasikan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial dalam satu rangkaian kegiatan. EcoSquad diposisikan sebagai gerakan edukatif yang mendorong masyarakat untuk mengenali potensi lingkungan sekitarnya, sekaligus mengolahnya menjadi produk yang bernilai guna dan bernilai ekonomi.

Dalam pelaksanaannya, mahasiswa ULM berperan sebagai fasilitator yang mendampingi masyarakat secara aktif. Pendampingan ini dilakukan tidak hanya

dalam bentuk penyampaian materi, tetapi juga melalui praktik langsung yang melibatkan partisipasi warga. Dengan pendekatan tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya memahami konsep yang disampaikan, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Tim EcoSquad terdiri dari mahasiswa lintas program studi, antara lain Kesehatan Masyarakat, Teknik Kimia, Teknik Lingkungan, dan Ilmu Tanah. Kolaborasi lintas disiplin ini menjadi fondasi penting dalam pelaksanaan kegiatan yang bersifat komprehensif. Setiap bidang keilmuan berkontribusi sesuai dengan kompetensinya, mulai dari aspek kesehatan lingkungan, proses pengolahan bahan alami, hingga pemahaman karakteristik tanah dan sumber daya alam setempat.

Keberagaman latar belakang akademik tersebut memungkinkan tim EcoSquad merancang kegiatan yang tidak parsial. Edukasi mengenai potensi bahan alami, teknik pengolahan, hingga peluang pengembangan produk bernilai ekonomi disusun secara terintegrasi. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya diperkenalkan pada satu aspek tertentu, tetapi memperoleh gambaran utuh mengenai hubungan antara lingkungan, kesehatan, dan ekonomi.

Sebagai bagian dari Program Bina Desa ULM Berdampak, seluruh rangkaian kegiatan EcoSquad disusun secara terstruktur dan dilaksanakan selama tiga hari berturut-turut. Setiap hari memiliki fokus kegiatan yang saling berkesinambungan, sehingga proses pembelajaran masyarakat berlangsung secara bertahap dan sistematis.

Pada hari pertama pelaksanaan, kegiatan difokuskan pada edukasi pengelolaan limbah rumah tangga. Masyarakat di-



Oleh
AHSANUL KARIM*

rikan pemahaman mengenai dampak limbah domestik terhadap lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Edukasi ini menjadi langkah awal untuk membangun kesadaran bahwa persoalan sampah bukan semata urusan kebersihan, tetapi juga berkaitan erat dengan kesehatan dan keberlanjutan lingkungan.

Edukasi tersebut kemudian dilanjutkan dengan praktik pembuatan pupuk organik melalui pemanfaatan limbah rumah tangga. Melalui praktik ini, masyarakat diajak melihat secara langsung bahwa limbah yang selama ini dianggap tidak bernilai sebenarnya dapat diolah menjadi produk yang bermanfaat. Kegiatan ini tidak hanya mendorong pengurangan volume sampah, tetapi juga membuka peluang pemanfaatan pupuk organik untuk kebutuhan pertanian dan pekarangan warga.

Hari kedua kegiatan diisi dengan edukasi mengenai dampak limbah cair serta bahaya penggunaan bahan kimia terhadap lingkungan. Materi ini relevan dengan kondisi sehari-hari masyarakat yang kerap menggunakan berbagai produk berbahan

kimia tanpa memahami dampak jangka panjangnya. Melalui penjelasan yang aplikatif, masyarakat diajak memahami pentingnya memilih dan mengelola bahan yang lebih aman bagi lingkungan.

Sebagai tindak lanjut dari materi tersebut, peserta mengikuti praktik pembuatan sabun berbasis ekstrak daun pandan. Praktik ini diperkenalkan sebagai alternatif produk ramah lingkungan yang memanfaatkan bahan alami yang mudah ditemukan di sekitar desa. Selain sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan, pembuatan sabun berbahan alami ini juga memberikan gambaran awal mengenai potensi pengembangan produk rumah tangga yang bernilai guna dan bernilai ekonomi.

Sementara itu, pada hari ketiga, kegiatan difokuskan pada praktik pembuatan lilin aromaterapi berbahan dasar serai. Kegiatan ini diarahkan untuk membekali masyarakat dengan keterampilan ekonomi kreatif yang memiliki peluang untuk dikembangkan lebih lanjut. Pemanfaatan serai sebagai bahan utama menunjukkan bahwa tanaman lokal dapat diolah menjadi produk dengan nilai tambah, tanpa harus bergantung pada bahan sintetis.

Seluruh rangkaian kegiatan tersebut disusun dengan tujuan membangun keterampilan masyarakat secara bertahap. Mulai dari pengelolaan limbah, pemahaman dampak bahan kimia, hingga pengembangan produk berbasis bahan alami, EcoSquad berupaya menghadirkan pendekatan pemberdayaan yang menyeluruh. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga pengalaman praktis yang dapat diterapkan secara berkelanjutan.

Pemilihan Desa Aranio sebagai lokasi

pelaksanaan program didasarkan pada potensi sumber daya alam yang melimpah, namun belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat setempat. Kondisi ini menunjukkan adanya ruang pengembangan yang besar, terutama melalui program pemberdayaan yang mampu menjawab kebutuhan lokal. EcoSquad hadir sebagai upaya untuk mengisi ruang tersebut dengan pendekatan yang edukatif dan aplikatif.

Melalui Program Bina Desa ULM Berdampak, mahasiswa ULM menunjukkan peran aktif dalam mendukung pembangunan desa. Keterlibatan mahasiswa tidak hanya menjadi bagian dari proses pembelajaran akademik, tetapi juga wujud kontribusi nyata terhadap masyarakat. Pendekatan berbasis bahan alami dan ramah lingkungan yang diusung EcoSquad diharapkan dapat menjadi fondasi awal bagi terbangunnya kemandirian ekonomi masyarakat Desa Aranio.

Pada akhirnya, program ini tidak hanya berorientasi pada hasil jangka pendek, tetapi juga pada pembentukan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya lingkungan secara bijak. Dengan penguatan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama kegiatan, masyarakat Desa Aranio diharapkan mampu melanjutkan dan mengembangkan inisiatif serupa secara mandiri demi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan ekonomi di masa mendatang. (*/al/ram)

*Mahasiswa Program Studi
Kesehatan Masyarakat Fakultas
Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Lambung Mangkurat*



Universitas
LAMBUNG MANGKURAT
Waja Sampai ka Puting



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK



Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

Opini Dosen /
Mahasiswa

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Banjarmasin Post

15 Januari 2026



Sempatkan...
● Sambungan Hal 9

Mangkurat (ULM) semester 8.

Meski sibuk skripsi, ia tetap meluangkan waktu untuk melakukan kegiatan lain. Hal tersebut menjadi upaya Diana menghilangkan stres akibat tugas akhir tersebut.

"Mengisi waktu luang selain mengerjakan skripsi, saya biasanya ikut kegiatan rutin sanggar tari dan travelling dengan keluarga," ujarnya kepada *BPost*, Rabu (14/1).

Travelling atau perjalanan yang menjadi pilihan Diana adalah terkait alam.

Ia menyempatkan waktu dan tenaga untuk mengeksplor alam di wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel).

Tak hanya eksplor alam, ia bersama keluarga juga kerap menikmati kuliner-kuliner.

"Saya juga rutin menari tradisional setiap pekan membantu menjernihkan p...

kiran saya," kata Diana.

Selain menari di sanggar, ia juga hobi olahraga, yakni bermain bulu tangkis dan berenang.

Sesuai dengan pendidikan yang ditempuh, Diana berharap bisa berkarir di dunia komunikasi atau media.

"Ke depan saya berharap bisa berkarier di bidang komunikasi atau media dengan harapan memperluas pengetahuan dan mengasah kemampuan sedini mungkin," harapnya. (naa)



Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

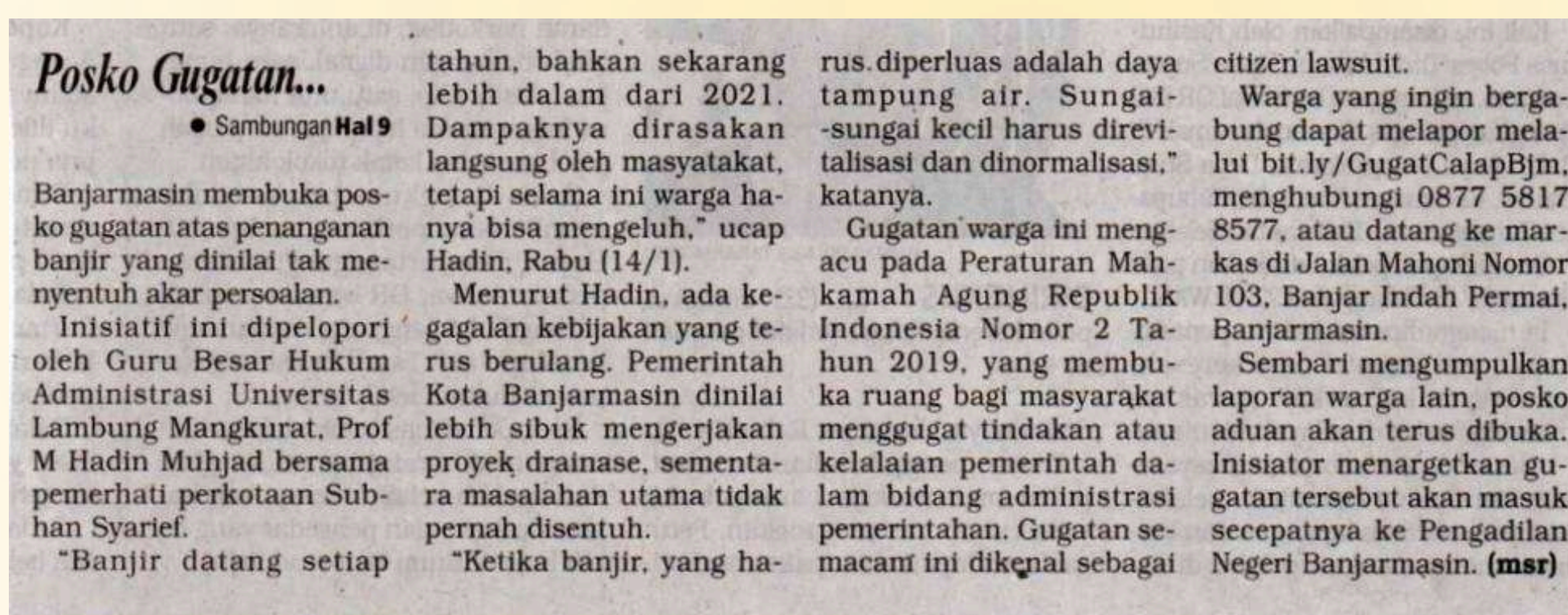
Opini Dosen /
Mahasiswa

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Banjarmasin Post

15 Januari 2026





Universitas
LAMBUNG MANGKURAT
Waja Sampai ka Puting



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK



Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

**Opini Dosen /
Mahasiswa**

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Banjarmasin Post

19 Januari 2026

Jadi Bagian Integral Sistem Pendidikan

SAAT ini, meningkatnya penyalahgunaan narkoba menjadi ancaman serius bagi generasi muda.

Karena itu, saya sangat mendukung agar pendidikan antinarkoba dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah, baik di tingkat SD maupun SMP.

Pendidikan ini sebaiknya tidak hanya menjadi pelajaran khusus, tetapi juga dapat diintegrasikan ke dalam mata pelajaran lain, seperti Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.

Dalam mata pelajaran ini, siswa dapat mempelajari apa itu narkoba, dampak buruknya, dan bagaimana narkoba dapat merusak masa depan mereka.

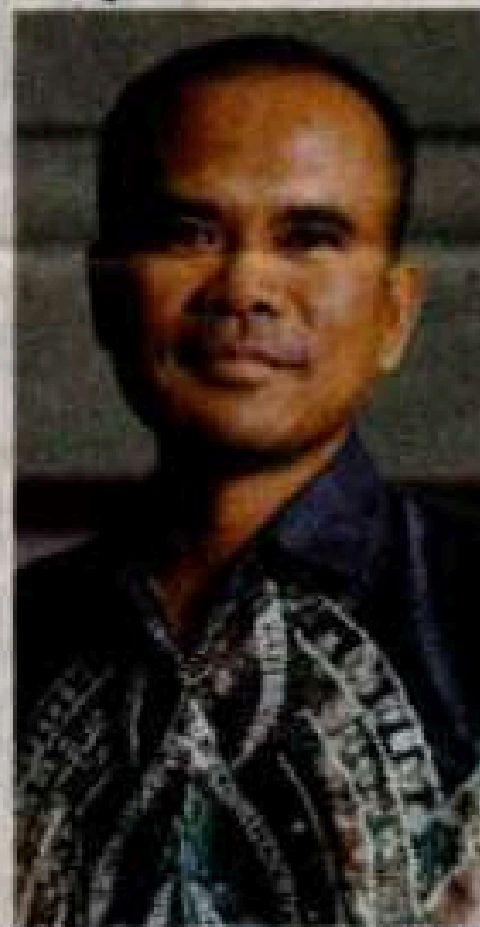
Hal ini merupakan bagian dari upaya kita untuk mengurangi angka penyalahgunaan narkoba di kalangan anak muda, dengan harapan dapat membangun generasi yang lebih baik dan kuat di masa depan.

Pendidikan antinarkoba harus menjadi bagian integral dari sistem pendidikan kita pada semua tingkat, karena anak-anak adalah aset berharga bagi kemajuan bangsa.

Selain itu, penting juga untuk memberikan contoh nyata kepada siswa tentang dampak narkoba, mungkin dengan menghadirkan tokoh yang pernah terlibat narkoba dan bagaimana hal itu mempengaruhi kesehatan dan reputasi mereka.

Pemerintah dan Badan Narkotika Nasional perlu terus mengingatkan dan mengimplementasikan pendidikan antinarkoba dalam kehidupan sekolah, serta mengintegrasikannya ke dalam nilai-nilai dan soal ujian. (mel)

**NEWS
ANALYSIS**



ISTIMEWA

MOH YAMIN

Dosen FKIP ULM Banjarmasin



Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

Opini Dosen /
Mahasiswa

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Barito Post

19 Januari 2026

Dua Prodi Pascasarjana ULM Raih Akreditasi Baik Sekali

Banjarmasin, BARITO

Universitas Lambung Mangkurat (ULM) kembali menorehkan prestasi. Dua program studi (prodi) di Pascasarjana berhasil meraih akreditasi perdana dengan peringkat Baik Sekali dari Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK).

Dua prodi tersebut yakni Program Studi S3 Pendidikan Bahasa Indonesia dan Program Studi S2 Teknologi Pendidikan.

"Dua program studi di Pascasarjana ini berhasil meraih peringkat akreditasi Baik Sekali," kata Rektor ULM, Prof Ahmad Alim Bachri, di Banjarmasin, kemarin.

Rektor menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan ini

bersambung ke hal 05

Dua Prodi...

merupakan buah dari kerja kolektif seluruh sivitas akademika ULM yang dilandasi dedikasi, komitmen, dan sinergi.

Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang telah mengawal proses akreditasi ini dengan penuh dedikasi. Insya Allah, ini menjadi berkah di awal 2026 bagi ULM," ujarnya.

Berdasarkan keputusan LAMDIK, akreditasi kedua program studi tersebut berlaku selama lima tahun ke depan hingga 2030.

Prof Alim menilai, capaian ini semakin mengukuhkan posisi ULM sebagai perguruan tinggi yang serius mengembangkan pendidikan pascasarjana berkualitas, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

"Ini juga bentuk nyata komitmen institusi dalam membangun budaya mutu yang berkelanjutan," tegasnya.

Akreditasi Baik Sekali ini diyakini mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap kualitas penyelenggaraan pendidikan Pascasarjana di ULM.

Ke depan, dengan semangat perbaikan berkelanjutan, ULM optimistis dapat menghadirkan pendidikan tinggi yang semakin berkualitas dan berdampak, sejalan dengan visi menjadi perguruan tinggi unggul yang berkontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan nasional.

Selain prestasi akreditasi, ULM juga bersiap membuka dua program studi untuk Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) di Kabupaten Balangan, yakni Prodi Peternakan dan Prodi Teknik Mesin.

"Kami telah melakukan peninjauan langsung kesiapan lokasi dan fasilitas PSDKU ULM bersama Pemerintah Kabupaten Balangan," ujar Ketua Tim PSDKU ULM, Ansar Nor, di Banjarmasin, Jumat.

Dalam kunjungan tersebut, Tim PSDKU ULM meninjau empat lokasi yang diproyeksikan menjadi sarana pendukung kegiatan akademik, yakni Sentra Pembibitan Peternakan, UPTD Laboratorium Lingkungan, Balai Latihan Kerja (BLK) Balangan, serta gedung SDIT di belakang Masjid Al-Akbar.

Peninjauan ini menjadi bagian penting dalam memastikan kesiapan fisik, ruang perkuliahan, serta fasilitas praktik yang akan menjadi penilaian pada tahap visitasi asesor.

Ansar menilai, fasilitas perkuliahan dan praktik yang tersedia dinilai layak untuk mendukung proses pembelajaran.

Ia juga menilai Kabupaten Balangan memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai pusat pendidikan baru di kawasan Banua Anam, mengingat

Sambungan hal 1

letaknya yang strategis dan aksesibilitas yang baik.

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Balangan, Tuhalus, menyampaikan Pemkab Balangan menargetkan pembukaan dua program studi tersebut pada awal 2026.

Ia menegaskan, pemerintah daerah telah menyiapkan dukungan penuh, mulai dari dana hibah hingga sarana dan prasarana penunjang.

"Mulai dari gedung, fasilitas belajar, laboratorium, hingga lokasi praktik sudah kami siapkan," tegasnya.

Dengan persiapan yang terus dimatangkan bersama pemerintah daerah, ULM optimistis PSDKU Balangan dapat segera beroperasi dan menjadi pusat pengembangan pendidikan tinggi yang relevan dengan kebutuhan daerah serta potensi lokal Kabupaten Balangan.

Kehadiran PSDKU ULM di Balangan dipandang sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah.

Melalui kerja sama ini, ULM tidak hanya memperluas layanan pendidikan tinggi, tetapi juga berkontribusi langsung dalam mendorong pemerataan akses pendidikan serta peningkatan kompetensi generasi muda agar mampu berperan aktif dalam pembangunan daerah.



Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

Opini Dosen /
Mahasiswa

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Barito Post

19 Januari 2026

■ Pemprov dan Kabupaten/Kota Harus Berkolaborasi

Banjarmasin, BARITO - Persoalan banjir yang terus berulang di Kalimantan Selatan dinilai tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan parsial dan sektoral. Pemerintah Provinsi Kalsel didesak segera menyusun perencanaan jangka menengah dan panjang secara terintegrasi dengan memperkuat kolaborasi lintas kabupaten/kota, khususnya di wilayah hulu dan hilir daerah aliran sungai (DAS).

Pengamat Politik dan Kebijakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Dr. Taufik Arbain, menegaskan, penanganan banjir membutuhkan kebijakan lintas wilayah yang terkoordinasi dan berkelanjutan.

"Banjir di Kalsel tidak bisa ditangani sendiri-sendiri oleh kabupaten/kota. Harus ada orkestrasi kebijakan dari provinsi dengan dukungan pusat, karena ini menyangkut satu ekosistem DAS yang saling terhubung dari hulu hingga hilir," ujar Taufik di Banjarmasin, dikutip dari Antara, kemarin.

Menurutnya, sejumlah langkah strategis perlu segera ditempuh, mulai dari penataan perizinan, pengawasan tata kelola pertambangan dan perkebunan skala besar, hingga program kanalisasi dan pengerukan sungai secara masif.

Kalsel Diminta...

"Pendanaannya bisa bersumber dari APBD kabupaten/kota dan provinsi. Namun, untuk sungai-sungai besar, dukungan APBN menjadi mutlak agar dampaknya signifikan," jelasnya.

Taufik juga mendorong pemerintah daerah agar lebih proaktif mengajukan proposal ke pemerintah pusat agar penanganan banjir tertentu dapat ditetapkan sebagai proyek strategis nasional (PSN).

"Jika banjir ditetapkan sebagai proyek strategis nasional, intervensinya akan jauh lebih kuat. Ini bukan sekadar program tahunan, tetapi investasi jangka panjang bagi keselamatan warga," tegasnya.

Ia menilai, kebijakan tersebut akan menjadi legacy atau warisan penting bagi pemerintah daerah, terlebih jika dikembangkan dengan konsep one river, one management.

"Artinya, satu sungai dikelola oleh satu sistem manajemen terpadu, tidak terfragmentasi oleh batas administratif daerah," ungkapnya.

Taufik mengingatkan, realitas banjir yang terjadi saat ini tidak bisa dilepaskan dari dampak kebijakan masa lalu, khususnya Undang-Undang Desentralisasi tahun 2000 yang memberikan kewenangan perizinan tambang kepada bupati dan wali kota hingga selditar 2009.

"Kebijakan itu menyebabkan maraknya izin pertambangan dan perkebunan yang tidak terkendali. Dampaknya kita rasakan sekarang," ujarnya.

Meski pemerintah telah

mencabut sekitar 400 izin dari total kurang lebih 600 izin tambang sejak 2015 hingga 2020 karena menyimpang dari tata kelola, Taufik menilai dampaknya masih dirasakan oleh masyarakat.

"Ini menjadi tantangan berat bagi kepala daerah hari ini dan ke depan," tambah Koordinator Program Studi S2 Magister Administrasi Publik FISIP ULM tersebut.

Dalam konteks kebijakan populis, Taufik menyarankan agar kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota bersama wakilnya, turun langsung ke lapangan menyambangi warga terdampak banjir.

"Kehadiran pemimpin di tengah warga itu penting. Bukan sekadar seremonial, tetapi bentuk empati dan kehadiran negara," katanya.

Ia menjelaskan, ketika agenda kebijakan membutuhkan waktu lama untuk dirancang dan dieksekusi, maka pendekatan populis menjadi sangat relevan.

"Kehadiran pemimpin membangun nuansa kebatinan dan empati. Secara psikologis, masyarakat akan merasa lebih tenang, meskipun bantuan yang diberikan terbatas karena keterbatasan anggaran," jelasnya.

Taufik juga mendorong pemerintah melibatkan aktor-aktor lain seperti organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, komunitas lokal, dan relawan agar ikut berpartisipasi aktif membantu warga terdampak.

"Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak bekerja

sendiri, tetapi merangkul semua pihak," ujarnya.

Ketua DPD Indonesian Association for Public Administration (IAPA) nSelatan itu menegaskan, kepala daerah tidak perlu khawatir terhadap cibiran publik atau warganet ketika turun ke lapangan, meskipun dianggap terlambat.

"Pemerintah memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai pelaksana kebijakan (policy) dan fungsi kebajikan (virtues). Abaikan saja cibiran itu, yang penting terus perkuat bantuan dan hadir di tengah masyarakat," ujarnya.

Menurut Taufik, sikap tersebut justru mencerminkan sense of humanity seorang pemimpin daerah.

Pendekatan populis yang disertai fungsi kebajikan ini dinilai mampu meminimalkan kritik publik, terutama yang dipicu oleh narasi kontraproduktif sebagian pejabat dalam merespons fakta banjir.

Sementara itu, Pemerintah Kota Banjarmasin bersama warga mengintensifkan gotong royong membersihkan sungai sebagai upaya menjaga kebersihan lingkungan sekaligus memulihkan fungsi sungai.

Wali Kota Banjarmasin, H Muhammad Yamin HR, turun langsung meninjau kegiatan gotong royong di Komplek R Land, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Sabtu.

Menurut Yamin, kondisi sungai di kawasan tersebut sudah dangkal dan dipenuhi tumbuhan liar sehingga aliran air tidak berjalan optimal.

Sambungan hal 1

"Saat banjir kemarin, air lama surut karena fungsi sungai tidak maksimal. Maka hari ini kita turun bersama warga membersihkannya," ujar Yamin.

Pemko Banjarmasin menurunkan alat berat untuk mengeruk dasar sungai. Selain itu, dilakukan pemberian sampah dan tanaman liar yang menutup aliran air.

Dalam peninjauan tersebut, Yamin juga menemukan sedikitnya tiga bangunan yang berdiri di atas badan sungai, berupa titian atau jembatan kecil, pos perumahan, dan satu unit rumah warga.

Ia menegaskan pentingnya peran aparat wilayah mulai dari RT hingga kecamatan untuk melakukan peneguran secara persuasif kepada pemilik bangunan.

"Saya minta ini segera dilaporkan ke Dinas PUPR agar ditindaklanjuti dengan surat resmi pembongkaran. Kalau tidak diindahkan, Satpol PP akan turun melakukan penertiban sesuai aturan," tegasnya.

Yamin juga menyoroti kondisi siring sungai yang mulai mengalami kerusakan.

"Ini harus segera diperbaiki agar tidak semakin parah dan demi keselamatan warga," katanya.

Sebelumnya, Wali Kota juga turun bersama warga membersihkan Sungai Saka Panglun di wilayah Pemurus Dalam, Banjarmasin Selatan.

Kegiatan gotong royong ini akan kita intensifkan di sungai-sungai lain, terutama wilayah yang kemarin terdampak banjir cukup parah," pungkasnya. ant



Universitas
LAMBUNG MANGKURAT
Waja Sampai ka Puting



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK



Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

Opini Dosen /
Mahasiswa

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Barito Post

19 Januari 2026

Mahasiswa Baru ULM Bebas Iuran Pengembangan Institusi

Banjarbaru, BARITO

Universitas Lambung Mangkurat (ULM) membebaskan dari iuran pengembangan institusi (IPI) bagi mahasiswa baru sebagai kebijakan untuk meringankan beban orangtua dari pembayaran di awal masuk perkuliahan itu.

"Kami tidak menerapkan iuran pengembangan institusi agar informasi ini dapat diketahui masyarakat khususnya mereka yang berminat masuk ULM," kata Rektor ULM Prof Ahmad Alim Bachri di Banjarmasin, Jumat.

Kebijakan tanpa IPI di ULM ini telah berjalan selama empat tahun di bawah kepemimpinan sang rektor. ULM pun mendapatkan apresiasi dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Prof Brian Yulianto.

Hal tersebut disampaikan

menteri dalam pertemuan yang berlangsung di Fakultas Pertanian ULM di Banjarbaru bersama Rektor ULM beserta jajaran Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, dan sivitas akademika ULM.

Prof Brian Yulianto menyempatkan diri mengunjungi ULM di sela-sela mendampingi kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Kalimantan Selatan.

Prof Alim menyebut kebijakan ini menunjukkan komitmen ULM sebagai Kampus Berdampak yang mengedepankan akses pendidikan tinggi tanpa beban tambahan bagi mahasiswa.

Dia berharap kebijakan progresif ini menjadi ladang pengabdian ULM untuk menghadirkan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.

IPI atau sering disebut sumbangan pengembangan institusi (SPI) adalah biaya

pendidikan satu kali yang dibayar mahasiswa baru, khususnya jalur mandiri untuk mendukung pengembangan fasilitas dan kualitas perguruan tinggi.

Sedangkan ULM hanya menerapkan uang kuliah tunggal (UKT) yang dibayar tiap semester dan besarnya disesuaikan kemampuan ekonomi dengan keringanan yang tersedia bagi yang membutuhkan.

Sebagai perguruan tinggi negeri (PTN) terakreditasi Unggul, ULM terus menjadi pilihan utama bagi calon mahasiswa di wilayah Kalimantan.

Jumlah mahasiswa ULM saat ini mencapai lebih dari 32.000 orang tersebar di 115 program studi dari 11 fakultas dan satu program pascasarjana yang 50 persen sudah terakreditasi A ataupun unggul.

ant/slm



Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

Opini Dosen /
Mahasiswa

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Barito Post

19 Januari 2026

Sunarto: Bapak, Kakak dan Pimpinan Tanpa Keluhan

BANJARBARU, Januari 1984. Saya datang ke Kalimantan Selatan sebagai anak muda dengan bekal keberanian lebih besar daripada pengetahuan. Dari udara, bentang alam yang luas terasa sekaligus menjanjikan dan menantang. Ini bukan sekadar tempat tugas baru, tetapi medan pembelajaran tentang hidup, tentang pengabdian, dan kelak tentang kepemimpinan.

Malam pertama saya habiskan di Banjarbaru, kota yang kala itu sunyi namun tertata, kota yang sejak awal terasa menyimpan masa depan. Keesokan harinya saya pindah ke Banjarmasin dan melapor ke Universitas Lambung Mangkurat. Air bersih sulit, fasilitas terbatas, tetapi semangat justru tumbuh dari kesederhanaan itu. Inilah masa-masa awal pembentukan diri, ketika keluhan seharusnya bukan pilihan.

Perjumpaan pertama dengan Pak Sunarto, kemudian saya memanggilnya Pak Narto, terjadi di Jurusan Sejarah FKIP ULM. Gedung lama bekas sekolah, dengan tiang-tiang yang bila disentuh bisa bergoyang. Dengan iseng khas anak muda, saya menggoyang salah satunya. Pak Narto keluar ruangan, tersenyum, dan memandang tanpa teguran. Tidak ada omelan, tidak ada amarah. Hanya senyum yang mengandung heran sekaligus penerimaan. Sejak saat itu saya tahu, saya berhadapan dengan sosok pemimpin yang tidak reaktif, tidak gemar menghakimi.

Saya datang dengan penampilan yang, untuk ukuran kampus saat itu, terbelah tidak lazim. Celana jeans, rambut panjang, bicara lugas tanpa banyak basa-basi. Pak Narto menerimanya apa adanya. Tidak ada upaya menundukkan, tidak ada tuntutan untuk menjadi orang

akademik dijalankan.

Dari perjumpaan awal itulah saya mulai memahami bahwa kepemimpinan tidak selalu hadir lewat suara keras atau aturan yang menekan. Ada pemimpin yang memilih memberi ruang, mempercayai, dan membimbing tanpa keluhan. Pak Narto adalah contoh pertama yang saya jumpai dan yang jejaknya kelak menetap lama dalam ingatan dan cara saya memandang dunia.

Sebagai dosen baru, saya langsung diberi tanggung jawab mengajar beberapa mata kuliah dasar hingga kawasan. Kelas besar, mahasiswa lintas jurusan, usia kami tak terpaut jauh. Dinamika kelas kadang keras, kadang liar, bahkan pernah ada ekspresi protes khas anak muda yang hari ini mungkin terdengar berlebihan. Semua itu saya jalani tanpa drama, dan Pak Narto tidak pernah mempermasalahkannya selama tugas dijalankan dengan sungguh-sungguh.

Di luar ruang kelas, relasi kami berkembang menjadi lebih personal. Saya kerap diminta datang ke rumah beliau. Dari sanalah keakraban tumbuh secara alami. Makan bersama, berbagi selera kuliner, hingga kebiasaan menonton bulu tangkis, olahraga yang sama-sama kami cintai. Rumah Pak Narto menjadi ruang aman, tempat berdiskusi tanpa rasa dihakimi.

Yang paling saya rasakan adalah penghargaan. Cara berpakaian, gaya bicara, bahkan kejujuran saya yang kadang terlalu lugas tidak pernah dipersalahkan. Jika tidak setuju, saya katakan tidak setuju. Jika makanan terasa asin, saya sampaikan apa adanya. Anehnya, relasi justru semakin hangat. Saya merasa diterima sebagai manusia utuh, bukan sekadar bawahan atau



Oleh

PROF. DR. DRS.

ERSIS WARMANSYAH ABBAS, BA, M.PD

Dalam diskusi-diskusi penting, Pak Narto memberi kebebasan berpendapat. Gagasan boleh diuji, bahkan disanggah. Namun ketika keputusan diambil, ia dijalankan dengan tenang. Dari beliau saya belajar: hormat tidak selalu lahir dari ketakutan, melainkan dari keteladanan dan konsistensi sikap.

Di balik sikapnya yang tenang, Pak Narto bukan pemimpin yang permisif. Ia memberi ruang, tetapi juga menuntut tanggung jawab. Disiplin akademik dijaga tanpa perlu suara tinggi. Keterlambatan kuliah tidak ditoleransi, tugas yang lalai berisiko berujung pada kegagalan. Prinsip itu saya terapkan sampai hari ini, dan Pak Narto tidak pernah menghalanginya.

Ia juga memberi dukungan penuh pada kerja intelektual. Menulis bukan dianggap gangguan, melainkan bagian dari pengabdian akademik. Ketika mahasiswa kesulitan literatur, kami mencari jalan keluar bersama. Buku difotokopi, dituliskan dengan tangan di rumah

ada kemauan untuk memastikan proses belajar tetap berjalan.

Pak Narto menyimpan peralatan penulisan sederhana, sesuatu yang mungkin terdengar remeh, tetapi bagi kami sangat berarti. Dari situ saya belajar bahwa keberpihakan pada ilmu pengetahuan tidak selalu membutuhkan kebijakan besar; sering kali cukup dengan sikap mau membantu secara konkret.

Ketika saya mengutarakan keinginan membuat jurnal, ia menyambutnya dengan antusias. Tidak ada kekhawatiran berlebihan, tidak ada kecurigaan. Menulis, bagi Pak Narto, adalah bentuk tanggung jawab akademik, bukan ambisi pribadi. Sikap itulah yang menumbuhkan kepercayaan diri dan keberanian intelektual. Modal penting bagi siapa pun yang ingin bertahan di dunia akademik.

Ujian terbesar relasi kami justru datang ketika saya menempuh studi S2 di Bandung. Saat itu status saya belum mapan sebagai PNS, sementara godaan hidup di kota besar terbuka lebar. Saya menulis di media, bekerja sebagai wartawan, bahkan membangun usaha. Penghasilan harian terasa jauh melampaui gaji bulanan sebagai dosen. Ada saat ketika pikiran untuk meninggalkan kampus dan pengabdian negara muncul tanpa malu-malu.

Pak Narto tidak marah. Ia memilih cara lain, mengingatkan. Berkali-kali surat dikirim agar saya kembali bertugas. Tidak ada ancaman, tidak ada kata keras, hanya tanggung jawab yang ia pikul sebagai pimpinan. Hingga akhirnya ia mengutus seorang sahabat untuk membuluk saya pulang. Di situlah saya

Saya kembali ke Kalimantan Selatan dengan perasaan bersalah. Namun Pak Narto menyambut tanpa keluhan. Tidak ada sindiran, tidak ada penghakiman. Ia menerima seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Dari situ saya belajar bahwa kepemimpinan sejati tidak diukur dari kemampuan menghukum, melainkan dari kesanggupan memulihkan.

Sebagai dekan, sebagai dosen, sebagai figur keluarga, Pak Narto tetap sama. Tenang, konsisten, dan tidak membebani. Ia mendukung langkah-langkah saya berikutnya di pemerintahan, di organisasi, hingga pendidikan doctoral, bahkan ketika ia tidak lagi berada dalam posisi formal. Dukungan itu tulus, tanpa pamrih.

Bagi keluarga kami, rumah Pak Narto adalah tempat kenangan. Anak-anak tumbuh dengan memanggilnya Kai, sosok yang mereka ingat lewat halaman sejuk dan suara burung. Dari sanalah mereka belajar tentang kehangatan, dorongan untuk belajar, dan harapan agar menjadi manusia yang lebih baik.

Kini, ketika saya menoleh ke belakang, saya paham, Pak Narto bukan hanya pimpinan, tetapi orang tua akademik yang membentuk karakter tanpa banyak kata. Ia mengajarkan bahwa kekuasaan tidak harus berisik, dan kepemimpinan tidak perlu penuh keluhan.

Doa terbaik saya panjatkan untuk beliau, sebagai guru, kakak, dan pemimpin yang memberi teladan dengan ketenangan. Jejaknya hidup dalam cara saya bekerja, mendidik, dan mengambil keputusan. Dan itu, bagi saya, adalah warisan yang paling berharga. (*/al/ram)



Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

Opini Dosen /
Mahasiswa

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Radar Banjarmasin

20 Januari 2026

BEM ULM Ajak Dialog Terbuka Soal Pilkada

BANJARMASIN — Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak langsung melalui DPRD yang kembali menghangat memantik respons dari kalangan mahasiswa. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat (BEM ULM) Banjarmasin, Adi Jayadi membuka ruang dialog dengan seluruh pimpinan partai politik tingkat provinsi di Kalimantan Selatan.

Ajakan diskusi itu ditegaskan Adi agar pembahasan Pilkada tidak terjebak pada sikap politik semata. Melainkan berangkat dari kajian ilmiah dan argumentasi rasional. "Ayo kita coba ngobrol berlandaskan kajian dan narasi ilmiah. Bukan karena bersikap atas dasar arahan pimpinan pusat

mendukung ataupun menolak," ujarnya, Minggu (18/1).

Keinginan berdialog ini muncul seiring belum terakomodirnya secara tuntas sikap penolakan BEM se-Kalsel terhadap wacana Pilkada tidak langsung dalam pertemuan dengan DPRD Kalsel, Kamis (15/1) lalu. Selain itu, Adi juga merespons pernyataan Anggota Komisi III DPRD Kalsel dari Fraksi PDI Perjuangan, Roschan Noor Bahri yang menyebut dirinya secara pribadi berada di barisan rakyat. "Beliau pasti bagian dari masyarakat. Tidak mungkin anggota di daerah bertentangan dengan apa yang dikehendaki pimpinan pusat. Tapi, tetap kami perlu sikap dari DPRD Kalsel," ucapnya. ■

► Baca BEM... Hal 14

Tidak Boleh Ditarik Mundur

■ BEM...

Sambungan Hal 9

Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Selatan, Muhammad Syaripuddin menyatakan kesiapan partainya membuka ruang dialog atas aspirasi yang disampaikan mahasiswa dan masyarakat. "Dengan segala kerendahan hati, kami siap menerima dan membuka ruang dialog bagi siapapun yang ingin berdiskusi secara konstruktif," ucap Bang Dhin, Senin (19/1).

Ia menegaskan, sikap tersebut merupakan komitmen PDI Perjuangan untuk mendengar, menyerap, dan merespons aspirasi masyarakat, khususnya generasi muda, demi demokrasi yang sehat dan berkeadaban.

Bang Dhin menekankan, sebelum gelombang penolakan terhadap wacana Pilkada tidak langsung menguat di daerah, PDI Perjuangan secara nasional telah menegaskan sikap politiknya melalui Rakernas I. "Rakernas menegaskan satu sikap yang tidak boleh ditawar,

PDIP menolak pemilihan kepala daerah melalui DPRD," tegas Bang Dhin.

Mantan Wakil Ketua DPRD Kalsel periode 2019-2024 itu mengingatkan bahwa Pilkada langsung merupakan wujud kedaulatan rakyat dan buah reformasi yang tidak boleh ditarik mundur. "Mengambil kembali hak itu atas nama efisiensi atau stabilitas adalah kemunduran demokrasi. PDIP akan berdiri di garis depan untuk menjaga agar demokrasi tidak ditarik mundur ke masa lalu," sebutnya.

Karena itu, DPD PDI Perjuangan Kalsel memastikan akan tegak lurus dan sejalan dengan garis kebijakan serta keputusan partai di tingkat nasional. Bang Dhin juga menanggapi alasan yang kerap digunakan dalam wacana perubahan mekanisme Pilkada, seperti tingginya biaya politik dan maraknya praktik politik uang. Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa dijadikan pembenaran untuk mengubah secara mendasar sistem Pilkada langsung.

Bagi PDI Perjuangan, akar persoalan justru terletak pada kelemahan sistemik. Mulai dari kualitas dan integritas peserta pemilu hingga lemahnya penegakan hukum. "Belum optimalnya pendidikan politik masyarakat, lemahnya transparansi pembiayaan politik, serta belum optimalnya penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu," singgunginya.

Oleh karena itu, ia mendorong pembenahan difokuskan pada penguatan sistem, regulasi, dan penegakan hukum. Bukan dengan menarik kembali hak politik rakyat. "Rakernas mendorong pelaksanaan Pilkada yang berbiaya rendah, antara lain menerapkan e-voting, penegakan hukum bagi pelanggaran pemilu seperti money politic, mencegah pembiayaan rekomendasi calon (mahar politik), pembatasan biaya kampanye, profesionalitas dan integritas penyelenggara pemilu," pungkasnya. (mr-162/az/dye)



RICARA: Ketua DPD PDIP Kalsel Muhammad Syaripuddin siap berdialog.



Universitas
LAMBUNG MANGKURAT
Waja Sampai ka Puting



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK



Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

Opini Dosen /
Mahasiswa

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Radar Banjarmasin

20 Januari 2026



MENJELASKAN: Kepala Disporapar Kabupaten Tabalong, Zulfan Noor menjelaskan terkait beasiswa perguruan tinggi.

Beasiswa di Tabalong Diperluas

TANJUNG - Pemerintah Kabupaten Tabalong melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) tahun ini kembali bekerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi ternama untuk program beasiswa bagi pelajar berprestasi.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Disporapar Kabupaten Tabalong, Zulfan Noor, "Beasiswa ini terbuka untuk umum bagi lulusan SMA sederajat asal Tabalong," katanya, Senin (19/1).

Sejumlah perguruan tinggi yang akan bekerja sama, terdiri dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Brawijaya (UNIBRAW), PEM Akamigas, Politeknik STIA (POLTEKSI), Politeknik Pekerjaan Umum (POLTEK PU), Politeknik Hasnur, Sekolah Tinggi Pertanian Nasional (STPN) dan Universitas Pembangunan Nasional (UPN).

Ia menjelaskan, beasiswa ini diberikan dengan syarat seleksi yang diserahkan sepenuhnya kepada semua perguruan tinggi tersebut. "Untuk menjaga kualitas," jelasnya.

Program beasiswa menggunakan dana APBD Pemkab Tabalong ini melanjutkan program sebelumnya yang telah berhasil dilaksanakan. Namun, jumlah perguruan tinggi kali ini lebih banyak.

Sebelumnya terdapat Institut Teknologi PLN (ITPLN) bagi 20 orang, Universitas Pertamina (UPER) sebanyak 12 orang, Universitas Lambung Mangkurat (ULM) sebanyak 66 orang dan Universitas Gadjah Mada (UGM) sebanyak 2 orang.

Untuk kuota kali ini masih belum ditentukan berapa, karena Disporapar sedang melakukan koordinasi terkait program studi apa yang tepat menyesuaikan kebutuhan di daerah. (ibn/al/ris)

www.ulm.ac.id



Universitas
LAMBUNG MANGKURAT
Waja Sampai ka Puting



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK



Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

Opini Dosen /
Mahasiswa

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Radar Banjarmasin

21 Januari 2026



Usia 25 Tahun, Rachmatul Karimah Mantapkan Langkah Sebagai Figur Muda Inspiratif

DI usia 25 tahun, ia telah mengisi masa produktifnya dengan beragam peran strategis. Saat ini, ia bekerja sebagai staf Biro AU-AKA (Administrasi Umum, Akademik, dan Kemahasiswaan) di Institut Agama Islam Darul Ulum (IAIDU) Kandangan.

Tak hanya sebagai tenaga kependidikan, ia juga aktif sebagai dosen, baik di kampus tempatnya bekerja maupun sebagai dosen luar biasa di dua perguruan tinggi wilayah Benua Enam, dengan fokus mata kuliah bidang pendidikan.

Jejak akademiknya terbilang cemerlang. Alumni MAN 2 Hulu Sungai Selatan ini melanjutkan pendidikan S1 di IAIDU Kandangan pada Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) sejak 2018.

Berkat prestasi akademik yang konsisten, ia meraih beasiswa

hingga menyelesaikan studi pada 2022 sebagai wisudawan terbaik. Semangat belajarnya berlanjut dengan mengikuti Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) melalui beasiswa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI pada 2023 di Universitas Lambung Mangkurat (ULM), yang diselesaikannya dengan predikat terbaik.

Tak berhenti di situ, Rachmatul juga menuntaskan pendidikan Magister (S2) melalui program beasiswa di Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari dengan konsentrasi Kepemimpinan dan Manajemen Pendidikan. Pada jenjang ini, ia mengangkat kearifan lokal Hulu Sungai Selatan, yakni konsep "Rakat Mupakat" dalam kepemimpinan pendidikan.

"Konsep Rakat Mupakat mengajarkan bahwa kepemimpinan kolaboratif berbasis

nilai lokal mampu menjadi solusi dalam mengatasi keterbatasan aksi pendidikan," terangnya.

Penelitiannya membuktikan bahwa kepemimpinan pendidikan kolaboratif berbasis nilai lokal "Rakat Mupakat" efektif mengatasi keterbatasan aksi pendidikan. Karya tersebut dipresentasikan dalam seminar internasional daring bekerja sama dengan universitas di Malaysia, dipublikasikan di jurnal internasional, serta dibukukan. Rachmatul pun lulus S2 di usia 24 tahun sebagai lulusan dan publikasi terbaik.

Sejak masa kuliah, Rachmatul telah terbiasa bekerja sambil menempuh pendidikan. Ia pernah mengabdikan sebagai guru keterampilan menjahit di Madrasah Aliyah Abul Hasan, mengajar di MIN 3 Hulu Sungai Selatan, hingga menjadi guru privat.

Bahkan, saat pandemi

COVID-19, ia tetap produktif dengan bekerja sebagai pengawas lingkungan di bawah Dinas Perumahan, Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selain berkiprah di dunia pendidikan, Rachmatul juga merintis usaha di bidang pangan, khususnya distribusi beras yang dikelola melalui toko pribadi. Ia menyeimbangkan peran sebagai karyawan, dosen, dan wirausahawan dengan manajemen waktu dan skala prioritas yang disiplin.

Berbagai prestasi dan pengabdian pun telah ditorehkannya. Di antaranya, terpilih sebagai Duta Lingkungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2019, Duta Pelelingasih Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021, serta Pemuda Berprestasi Provinsi Kalimantan Selatan di tahun yang sama.

Konsistensinya dalam literasi dan publikasi ilmiah juga mengantarkannya meraih penghargaan Pemuda Berprestasi Bidang Pendidikan (Strata II) Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2025.

Bagi Rachmatul, usia 25 tahun merupakan fase krusial untuk memantapkan kematangan emosional dan psikologis. Ia menilai, kestabilan mental menjadi fondasi utama dalam menjalani kehidupan, baik di dunia kerja maupun pendidikan.

"Menjaga kestabilan mental menjadi fondasi utama. Ketika emosi terkelola dengan baik, proses menjalani kehidupan di usia selanjutnya akan terasa lebih terarah," tuturnya.

Baginya, 25 tahun berikutnya adalah fase untuk menjalani dan memantapkan keputusan. "Dua puluh lima tahun pertama adalah fase belajar dan membentuk diri.

Dua puluh lima tahun berikutnya adalah fase untuk memantapkan keputusan dan menjalani pilihan hidup dengan lebih sadar dan bertanggung jawab," katanya.

Dalam momentum Hari Jadi ke-25 Radar Banjarmasin, Rachmatul juga menyampaikan pandangannya mengenai peran media bagi generasi muda. Ia menilai Radar Banjarmasin memiliki peran strategis sebagai sumber informasi yang kredibel dan terpercaya, khususnya bagi anak muda di Kalimantan Selatan. "Radar Banjarmasin memiliki peran strategis sebagai sumber informasi yang kredibel dan terpercaya bagi generasi muda, terutama di Kalimantan Selatan," ujarnya.

Di usia ke-25 tahun, ia berharap Radar Banjarmasin terus menjadi wadah bagi pemuda inspiratif untuk dikenal luas dan menjadi role model bagi generasi lainnya. (mr-163/gr/mof)



Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

Opini Dosen /
Mahasiswa

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Radar Banjarmasin

21 Januari 2026

Ancaman Tersembunyi Pilkada Tidak Langsung

WACANA mengembalikan Pilkada tidak langsung melalui DPRD Kembali bergulir dan mencuat dan mengisi ruang publik nasional beberapa hari terakhir. Berbagai argumentasi para politisi, praktisi, aktivis, dan kelompok masyarakat sipil yang berkembang relatif berulang. Yaitu tentang mahalannya biaya Pilkada langsung, potensi meningkatnya konflik horizontal di tengah masyarakat, serta melahirkan politik populisme (populism) dan cenderung transaksional. Sementara, Pilkada tidak langsung dipromosikan sebagai solusi instan yang lebih efisien, rasional, dan stabil. Perdebatan ini sangat mewarnai ruang-ruang publik, namun hanya berhenti pada soal yang relative dan cenderung lebih terjaga. Sehingga, kepala daerah yang terpilih akan cenderung menggunakan kalkulasi opini publik dalam mengambil keputusan-keputusan strategis, misalnya dalam melakukan mutasi, rotasi, atau pengisian jabatan strategis dalam struktur birokrasi. Keputusan yang terlalu politis atau nepotistic akan berisiko menjadi bumerang elektoral pada Pilkada berikutnya. Pilkada langsung juga dapat membongkar hubungan pola pertanggungjawaban politik antara rakyat dan kepala daerah. Kepala daerah pasti menyadari bahwa kinerja pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan akan dirasakan dan dinilai secara langsung oleh masyarakat. Soalnya dalam berbagai kasus, kegagalan aspek-aspek tersebut menjadi faktor utama kekalahan petahana pada pilkada. Artinya, birokrasi adalah arena penting dalam konteks pertarungan elektoral, bukan sekadar alat politik elite. Pastinya Pilkada langsung bukan tanpa masalah. Politik uang, politisasi ASN, dan tarik-menarik kepentingan akan tetap terjadi. Namun setidaknya terdapat satu hal yang perlu digaris bawahi, yaitu tekanan

intervensi politik DPRD.

Dalam hal ini, DPRD berfungsi sebagai lembaga representasi rakyat yang menjalankan 3 fungsi utama yaitu, pengawasan, legislasi, dan penganggaran. Relasi antara eksekutif dan legislatif memang tidak harus selalu harmonis, namun secara normatif berada dalam kerangka checks and balances. Kepala daerah tidak lagi sepenuhnya bergantung pada DPRD untuk mempertahankan legitimasi politiknya, karena sumber legitimasi utama adalah pemilih (rakyat). Secara tidak langsung berdampak sangat signifikan terhadap birokrasi daerah. ASN, meskipun tidak seutuhnya steril dari politisasi, memiliki jalur profesional publik dan risiko elektoral yang memaksa kepala daerah menjaga batas dalam mengendalikan birokrasi.

Pilkada Tidak Langsung dan Pergeseran Loyalitas Kekuasaan
Situasi tersebut akan berubah secara fundamental apabila Pilkada tidak langsung diterapkan. Dalam desain ini, kepala daerah tidak lagi dipilih oleh rakyat, melainkan oleh DPRD. Perubahan ini secara sekilas terlihat prosedural, akan tetapi sesungguhnya sangat structural, karena akan menggeser prinsip utama legitimasi kekuasaan (legitimacy of power).

Kepala daerah yang dihasilkan melalui mekanisme Pilkada tidak langsung cenderung akan memikul ketergantungan politik yang tinggi kepada DPRD. Tidak hanya pada saat pemilihan saja, namun juga sepanjang masa jabatan berlangsung. DPRD tidak lagi sekadar pengawas sebagaimana tiga fungsi utamanya, melainkan akan potensial menjadi king maker yang akan menentukan lahirnya kekuasaan eksekutif daerah. Dampaknya, relasi antara eksekutif dan legislatif berisiko berubah, dari kemitraan kritis menjadi relasi transaksional. Dalam hal ini, posisi yang paling



Oleh
ACH FATORI, M.I.P.*

publik dan risiko elektoral yang memaksa kepala daerah menjaga batas dalam mengendalikan birokrasi.

Pilkada Tidak Langsung dan Pergeseran Loyalitas Kekuasaan
Situasi tersebut akan berubah secara fundamental apabila Pilkada tidak langsung diterapkan. Dalam desain ini, kepala daerah tidak lagi dipilih oleh rakyat, melainkan oleh DPRD. Perubahan ini secara sekilas terlihat prosedural, akan tetapi sesungguhnya sangat structural, karena akan menggeser prinsip utama legitimasi kekuasaan (legitimacy of power).

Kepala daerah yang dihasilkan melalui mekanisme Pilkada tidak langsung cenderung akan memikul ketergantungan politik yang tinggi kepada DPRD. Tidak hanya pada saat pemilihan saja, namun juga sepanjang masa jabatan berlangsung. DPRD tidak lagi sekadar pengawas sebagaimana tiga fungsi utamanya, melainkan akan potensial menjadi king maker yang akan menentukan lahirnya kekuasaan eksekutif daerah. Dampaknya, relasi antara eksekutif dan legislatif berisiko berubah, dari kemitraan kritis menjadi relasi transaksional. Dalam hal ini, posisi yang paling

rentan adalah birokrasi daerah. Ketika kepala daerah merasa berutang politik kepada DPRD, tekanan untuk "membalas jasa" hampir takkan terelakkan. Kompromi politik akan menjadi instrumen baru dalam proses mutasi jabatan, penempatan pejabat strategis, hingga distribusi proyek dan anggaran. Sehingga birokrasi akan menjadi arena konsesi kekuasaan, tidak lagi semata alat pelayanan publik.

Yang membuat kondisi ini berbahaya adalah sifatnya yang senyap. Tidak lagi ada keramaian kampanye, tidak ada lagi konflik terbuka di tengah-tengah masyarakat, serta tidak ada lagi hiruk-pikuk politik massa. Karena semua itu hanya berlangsung di ruang elite yang tertutup, sehingga praktik-praktik patronase akan lebih sulit diawasi. Partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan yang selama ini menjadi instrumen penting dalam Pilkada langsung, akan kehilangan pijakan.

Birokrasi Daerah sebagai Taruhan Terbesar Demokrasi Lokal

Sayangnya, aspek birokrasi belum menjadi fokus utama dalam diskursus publik mengenai Pilkada tidak langsung. Media lebih suka membahas hak pilih rakyat, sementara pengamat politik fokus pada peta koalisi partai mana yang mendukung pilkada tidak langsung dan yang tidak. Padahal, kita semua tahu bahwa birokrasi daerah adalah mesin utama negara di tingkat daerah, mulai dari pelayanan dasar, perizinan, hingga implementasi kebijakan sosial dan ekonomi.

Secara sederhana, jika sistem Pilkada mendorong birokrasi semakin terikat pada kepentingan elite politik, maka dampaknya akan terasa langsung pada kualitas pelayanan publik. Sistem merit berpotensi melemah, profesionalisme aparat pemerintah

tergerus, dan reformasi birokrasi yang selama ini diperjuangkan bisa mengalami kemunduran serius.

Dampak ini bersifat jangka panjang dan kumulatif, tidak langsung terlihat dalam satu atau dua tahun, tetapi perlahan membentuk budaya birokrasi yang oportunistik dan defensif. ASN belajar bahwa loyalitas politik lebih aman daripada kinerja profesional. Dalam jangka panjang, masyarakatlah yang menanggung biaya dari birokrasi yang tidak efektif dan tidak responsif.

Argumen bahwa Pilkada tidak langsung lebih efisien secara anggaran patut diuji dan dikaji lebih lanjut secara jernih. Efisiensi prosedural tidak otomatis berbanding lurus dengan kualitas tata kelola. Penghematan biaya Pilkada berisiko menjadi ilusi jika dibayar dengan kebijakan publik yang lemah, kompromi politik yang mahal, dan merosotnya kualitas pelayanan publik.

Perdebatan ini seharusnya bergeser dari sekadar soal mekanisme pemilihan menuju pertanyaan yang lebih fundamental, siapa yang mengendalikan birokrasi, kepada siapa kepala daerah bertanggung jawab, dan bagaimana kepentingan publik dijaga dalam struktur kekuasaan baru tersebut.

Tanpa menjawab pertanyaan tersebut, Pilkada tidak langsung berisiko menjadi solusi semu. Bisa jadi hanya untuk meredakan konflik jangka pendek, tetapi menyimpan persoalan baru yaitu tata kelola yang lebih dalam. Demokrasi lokal bukan hanya soal bagaimana pemimpin dipilih, tetapi bagaimana kekuasaan dijalankan dan diawasi setiap hari. Birokrasi daerah bukan sekadar variabel teknis, melainkan simpul penentu keberlanjutan demokrasi lokal yang terlalu strategis untuk diabaikan. (*/al/ram)

*Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan,
Universitas Lambung Mangkurat*



Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

Opini Dosen /
Mahasiswa

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Barito Post

21 Januari 2026

Kukuhkan Relawan Pajak, dan Bekali dengan Ilmu Perpajakan



Banjarmasin, BARITO

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Kalimantan Selatan dan Tengah (Kalselteng) menyelenggarakan kegiatan Pengukuhan Relawan Pajak untuk Negeri (RENJANT) Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Kanwil DJP Kalselteng.

Kegiatan ini diikuti secara luring dan daring oleh 135 mahasiswa serta 10 perwakilan dosen selaku pengurus Tax Center dari sejumlah perguruan tinggi di Kalimantan

Selatan dan Kalimantan Tengah. Mahasiswa yang dikukuhkan sebagai Relawan Pajak Tahun 2026 di lingkungan Kanwil DJP Kalselteng berasal dari perguruan tinggi sebagai berikut:

Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin
Universitas Sari Mulia Banjarmasin
Politeknik Negeri Banjarmasin
Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan
Politeknik Negeri Tanah Laut
Universitas Lambung

Mangkurat PSDKU
Politeknik Negeri Pontianak (Kampus Sukamara)
Universitas Antakusuma Pangkalan Bun
Universitas Darwan Ali
Universitas Palangka Raya

Pelaksanaan Program Relawan Pajak Tahun 2026 merupakan bagian dari upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam memperkuat strategi edukasi perpajakan melalui kolaborasi dengan pihak ketiga, khususnya perguruan tinggi.

Dalam sambutannya,

Kepala Kanwil DJP Kalselteng, Syamsinar, menyampaikan bahwa Relawan Pajak memiliki peran penting dalam membantu DJP melakukan edukasi perpajakan kepada Wajib Pajak. Relawan Pajak nantinya akan dilibatkan secara langsung dalam mendampingi Wajib Pajak yang ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan maupun memperoleh layanan perpajakan lainnya.

Selain seremoni pengukuhan, rangkaian kegiatan ini juga diisi dengan bimbingan teknis kepada para Relawan Pajak. Materi yang diberikan meliputi aktivasi akun Coretax DJP, permintaan Kode Otorisasi DJP, keterampilan komunikasi (communication skill), serta pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

"Pembekalan ini bertujuan untuk menambah pengetahuan Relawan Pajak agar mampu mendampingi Wajib Pajak dalam mengisi SPT Tahunan hingga tuntas," imbuhnya. afd



Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

Opini Dosen /
Mahasiswa

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Barito Post

21 Januari 2026

Akademisi ULM soroti IM 3/2025



Banjarmasin BARITO

Akademisi atau Guru Besar Universitas Lambung Mangkurat (ULM d/h Unlam) Banjarmasin Kalimantan Selatan (Kalsel) menyoroti Instruksi Menteri atau IM Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025.

IM 3/2025 tersebut tentang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Keselamatan dan Keamanan Pelayaran pada Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan (TSDP).

Sorotan Pakar hukum Tata Negara Fakultas Hukum Unlam Prof Dr H Hadin Muhjad SH MH serta Pakar Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Prof. Dr Budi Suryadi pada Fokus Group Discussion (FGD) Ikasuda Kalselteng di Hotel Harper Banjarmasin, Selasa.

Asosiasi Ikatan Kapal Sungai dan Danau atau Ikasuda Kalimantan Selatan dan Tengah (Kalselteng) menggelar FGD

dengan tema : "Instruksi Menteri Perhubungan No. 3 Tahun 2025 Dalam Tinjauan Hukum Tata Negara dan Hubungan Pusat Daerah" yang juga mengundang pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kota Banjarmasin.

Dalam FGD dengan moderator Rasyidi dari TVRI Kalsel tersebut, Prof Hadin berpendapat, IM 3/2025 menyalahi asas hukum dekonsentrasi, kendati pada dasarnya antara pusat dan daerah tak terpisahkan.

"Namun sesuai asas hukum dekonsentrasi ada hal-hal yang semestinya kewenangan daerah misalnya urusan kapal sungai dan danau, tak mesti pusat terlalu jauh mencampuri," ujar Hadin yang juga mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Sementara Guru Besar Ilmu Pemerintahan FISIP ULM tersebut berpendapat, IM 3/2025 merusak tata kelola pemerintahan, karenanya perlu peninjauan kembali.

Menurut dia, IM 3/2025 menggambarkan tidak tahu kerja, serta tak bisa membedakan antara kapal sungai dan danau dengan kapal laut. "Kapal sungai dan danau tidak bisa ke laut, sedangkan kapal laut bisa masuk sungai," katanya sambil berseloroh.

Selain tidak membuat efesien, IM 3/2025 tak mencerminkan "good government" (tata kelola pemerintahan yang baik), ujar Prof Budi.

Oleh sebab itu, kedua Guru Besar Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tertua di Kalsel atau Kalimantan tersebut mencoba memberi solusi guna meringankan beban Ikasuda dalam berusaha.

Beberapa solusi yang bersifat alternatif itu antara lain penundaan penerapan, mencabut IM 3/2025 dan merevisi IM tersebut.

Dari Ikasuda Kalselteng mengungkapkan hal-hal yang memberatkan bagi usaha mereka antara lain penyetaraan kapal sungai dan danau dengan kapal laut sehingga memerlukan dokumen khusus.

"Biaya pengurusan dokumen sebagaimana dimaksud IM 3/2025 tak lagi cuma Rp3 juta, tapi bisa mencapai puluhan, bahkan ratusan juta rupiah. Belum lagi persyaratan lain," ujar Sekretaris Ikasuda Kalselteng Muhlan Ahm.



Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

Opini Dosen /
Mahasiswa

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Barito Post

21 Januari 2026

Akademisi ULM soroti IM 32025

Banjarmasin, BARITO

Akademisi atau Guru Besar Universitas Lambung Mangkurat (ULM d/h ULM) Banjarmasin Kalimantan Selatan (Kalsel) menyoroti Instruksi Menteri atau IM Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025.

IM 3/2025 tersebut tentang Penyelenggaraan Tuna dan Fungsi Keselamatan dan Keamanan Pelayaran pada Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan (TSDP).

Sorotan Pakar hukum Tata Negara Fakultas Hukum ULM, Prof. Dr. H. Hadin Muhjau SH MH serta Pakar Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Prof. Dr. Budi Suryadi

pada Fokus Group Discussion (FGD) Ikasuda Kalselteng di Hotel Harper Banjarmasin, Selasa.

Asosiasi Ikatan Kapal Sungai dan Danau atau Ikasuda Kalimantan Selatan dan Tengah (Kalselteng) menggelar FGD dengan tema: "Instruksi Menteri Perhubungan No. 3 Tahun 2025 Dalam Tinjauan Hukum Tata Negara dan Hubungan Pusat Daerah" yang juga mengundang pegiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kota Banjarmasin.

Dalam FGD dengan moderator Rasyidi dari TVRI Kalsel tersebut, Prof. Hadin berpendapat, IM 3/2025 menyalahi asas hukum dekonstruksi, kendati pada

dasarnya antara pusat dan daerah tak terpisahkan.

"Namun sesuai asas hukum dekonstruksi ada hal-hal yang semestinya kewenangan daerah misalnya urusan kapal sungai dan danau, tak mesti pusat terlalu jauh mencampuri," ujar Hadin yang juga mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Sementara Guru Besar Ilmu Pemerintahan FISIP ULM tersebut berpendapat, IM 3/2025 merusak tata kelola pemerintahan, karenanya perlu peninjauan kembali.

Menurut dia, IM 3/2025 menggambarkan tidak tahu kerja, serta tak bisa membedakan antara kapal sungai dan danau dengan kapal laut.

"Kapal sungai dan danau tidak bisa ke laut, sedangkan kapal laut bisa masuk sungai," katanya sambil berseloroh.

Selain tidak membuat efisien, IM 3/2025 tak mencerminkan "good government" (tata kelola pemerintahan yang baik), ujar Prof. Budi.

Oleh sebab itu, kedua Guru Besar Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tertua di Kalsel atau Kalimantan tersebut mencoba memberi solusi guna meringankan beban Ikasuda dalam berusaha.

Beberapa solusi yang bersifat alternatif itu antara lain penundaan penerapan, mencabut IM 3/2025 dan merevisi IM tersebut. Dari Ikasuda Kalselteng mengungkapkan hal-hal yang memberatkan bagi usaha mereka antara lain penyetaraan kapal sungai dan danau dengan kapal laut sehingga memerlukan dokumen khusus.

"Biaya pengurusan dokumen sebagaimana dimaksud IM 3/2025 tak lagi cuma Rp3 juta, tapi bisa mencapai puluhan, bahkan ratusan juta rupiah. Belum lagi persyaratan lain," ujar Sekretaris Ikasuda Kalselteng Muhlan Aham.

Sedangkan moderator dalam komentar awal mengatakan, angkutan sungai dan danau salah ciri kehidupan di Borneo tempo doeloe dalam menunjang komunikasi, serta transportasi orang, barang dan jasa, ant-



Suasana Fokus Group Discussion Ikasuda Kalselteng di Hotel Harper Banjarmasin, Selasa (20/1/2025) siang. (P. Antara/bri)



Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

Opini Dosen /
Mahasiswa

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Banjarmasin Post

21 Januari 2026

7.000 Motoris Terancam Ngangg

■ Ikasuda Kalselteng Tolak IM 3/2025

BANJARMASIN, BPOST - Ikatan Kapal Sungai dan Danau (Ikasuda) Kalimantan Selatan-Kalimantan Tengah (Kalselteng) menolak Instruksi Menteri Perhubungan (IM) Nomor 3 Tahun 2025 yang dinilai memberatkan dan berpotensi mematikan operasional angkutan sungai.

Penolakan tersebut menuai dalam Forum Group Discussion (FGD) Ikasuda yang digelar di Hotel Herper, Banjarmasin, Selasa (20/1).

IM 3/2025 mengatur pengalih-

an penyelenggaraan keselamatan dan keamanan pelayaran Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan (TSDP) ke Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).

Namun, kebijakan tersebut dinilai menyamakan standar angkutan sungai dengan pelayaran laut, tanpa mempertimbangkan perbedaan karakter dan kemampuan ekonomi pelaku usaha sungai.

● Hal 11 | Kol 1-3

7.000 Motoris...

● Sambungan Hal 9

Ketua Ikasuda Kalselteng, Maulana Rahman mengatakan, penerapan IM 3/2025 akan menimbulkan lonjakan biaya operasional dan administrasi yang tidak sebanding dengan pendapatan angkutan sungai.

"Kalau sungai itu biayanya sekitar Rp 4 juta per tahun. Tapi kalau disamakan dengan laut, biayanya per tiga bulan. Satu dokumen bisa Rp 2,5 juta sampai Rp 3 juta. Ini jelas memberatkan," ujarnya.

Selain biaya, kebijakan tersebut juga mewajibkan awak kapal (ABK) untuk memenuhi standar pendidikan dan sertifikasi pelayaran laut.

"ABK harus kembali sekolah kalau mengacu IM 3 ini. Dengan kondisi seperti itu, kami praktis tidak bisa beroperasi lagi," katanya.

Maulana menambahkan, dampak kebijakan ini akan

langsung dirasakan oleh pelaku transportasi sungai dan masyarakat yang mengganggu mobilitas serta distribusi barang melalui jalur perairan.

"Anggota kami lebih dari 100 pemilik kapal, dengan jumlah armada hampir 1.000 unit. Kalau IM 3 ini tetap diterapkan, perekonomian teman-teman kapal sungai pasti terdampak," ucapnya.

Ikasuda Kalselteng menyatakan siap menempuh langkah lanjutan, termasuk aksi unjuk rasa, jika aspirasi mereka tidak diakomodasi.

"Langkah selanjutnya kami berencana melakukan demo," tegas Maulana.

Sementara itu, Sekretaris Ikasuda Kalselteng, Muhlan Alhan menilai, kebijakan IM 3/2025 diterapkan tanpa kajian dan pelibatan pelaku usaha di daerah.

"Tiba-tiba langsung diterapkan, tanpa ada kajian bersama kami. Karena itu, FGD ini kami gelar untuk mengumpulkan bahan ka-

jian dan mencari solusi," ujarnya.

Ia mengingatkan, jika konflik berlarut, tidak menutup kemungkinan terjadi gangguan serius pada transportasi sungai.

"Apakah nanti transportasi sungai yang berhenti, atau bahkan akses jembatan yang ditutup, itu bisa saja terjadi. Dampaknya tentu luas," katanya.

Selain itu, ada kemungkinan melonjaknya jumlah pengangguran. Sebab, sekitar 7.000 motoris tidak lagi bisa mencari penghasilan akibat IM 3/2025 tersebut.

Sebagai informasi, FGD itu menghadirkan dua pakar dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM), yakni Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Prof Hadin Muhjad dan Guru Besar Ilmu Pemerintahan FISIP Prof Budi Suryadi, untuk memberikan pandangan akademik dan alternatif solusi atas polemik IM 3/2025. (msr)



Universitas
LAMBUNG MANGKURAT
Waja Sampai ka Puting



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK



Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

**Opini Dosen /
Mahasiswa**

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Banjarmasin Post

21 Januari 2026

Tak Berpihak kepada Rakyat Kecil

GURU Besar Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Prof Budi Suryadi, mengatakan, substansi IM 3/2025 menunjukkan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat kecil, khususnya pelaku usaha dan pekerja di sektor angkutan sungai.

"IM 3/2025 ini tidak berpihak kepada kalangan rakyat kecil," ujarnya.

Ia menilai, kebijakan tersebut tidak sejalan dengan prinsip good governance, terutama dalam aspek partisipasi, akuntabilitas, dan komunikasi antarpemerintahan. "Instruksi ini tidak mencerminkan tata kelola

pemerintahan yang baik," tegasnya.

Budi juga menyoroti kuatnya kecenderungan sentralisasi dalam penerapan IM 3/2025.

Padahal, dalam sistem pemerintahan daerah, pemerintah pusat semestinya menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah provinsi hingga kabupaten/kota sebelum kebijakan diterapkan.

"Secara teori pemerintahan daerah, Dirjen seharusnya membangun komunikasi dengan pemerintah

● Hal 11 kol 1-3

Tak Berpihak kepada...

● Sambungan Hal 9

provinsi sampai kabupaten dan kota. Tapi dalam IM ini terlihat pengabaian terhadap prinsip desentralisasi," jelasnya.

Selain itu, Budi menegaskan bahwa dampak IM 3/2025 tidak hanya dirasakan oleh pengusaha angkutan sungai, tetapi juga oleh kru kapal yang berasal dari komunitas masyarakat setempat.

"Persoalan kapal sungai tidak bisa dilihat semata dari sisi pengusaha jasa angkutan. Di dalamnya ada kru kapal yang merupakan bagian dari masyarakat dan komunitas lokal. Keberadaan IM ini sangat merugikan mereka," katanya.

Ia mengingatkan, jika kebijakan tetap diberlakukan tanpa perbaikan dan dialog yang memadai, maka yang paling terdampak adalah kelompok ekonomi kecil yang selama ini bergantung pada transportasi sungai sebagai sumber penghidupan. (msr)



Universitas
LAMBUNG MANGKURAT
Waja Sampai ka Puting



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK



Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

Opini Dosen /
Mahasiswa

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Radar Banjarmasin

22 Januari 2026



KERJA SAMA: Suasana audiensi jajaran Dispora Tala dengan FISIP ULM terkait riset kepemudaan.

Susun Kebijakan Kepemudaan Berbasis Riset

PELAIHARI - Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tanah Laut (Dispora Tala) menggelar audiensi dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) untuk membahas rencana Perjanjian Kerja Sama (PKS) riset kepemudaan. Audiensi berlangsung di Banjarmasin, Selasa (20/1).

Pertemuan ini bertujuan memperkuat dasar akademis dalam perumusan kebijakan kepemudaan di Bumi Tuntung Pandang, khususnya dalam memetakan potensi serta

persoalan pemuda berusia 16 hingga 30 tahun.

Kepala Dispora Tala, Rudi Imtihansyah menegaskan pentingnya keterlibatan kalangan akademisi agar kebijakan yang disusun tidak sekadar berbasis asumsi. Melainkan didukung data dan kajian ilmiah yang kuat. Saat ini, Dispora Tala tengah fokus membangun ekosistem kepemudaan yang berkelanjutan dan terarah. "Kami memandang perlu adanya landasan akademis yang kuat dalam perumusan kebijakan. Dengan riset ini,

pembangunan sumber daya manusia, khususnya pemuda, dapat dilakukan secara terukur," ujarnya.

Selain sebagai dasar perumusan kebijakan baru, Rudi menilai riset tersebut juga penting untuk mengevaluasi berbagai program kepemudaan yang telah berjalan. Evaluasi ini diharapkan mampu mengukur dampak nyata program terhadap Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di Kabupaten Tanah Laut.

Ia menjelaskan, riset kepemudaan yang direncanakan tidak hanya berfokus pada

pemetaan profil pemuda, tetapi juga mencakup penyusunan strategi jangka panjang. Hasilnya diharapkan berupa rekomendasi rencana aksi yang sesuai dengan kebutuhan riil pemuda di lapangan.

Rencana kerja sama ini mendapat sambutan positif dari Dekan FISIP ULM, Dr. Irwansyah. Ia menyatakan kesediaan FISIP ULM untuk menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam memberikan masukan akademis dan saintifik bagi pembangunan daerah, khususnya di sektor kepemudaan. (sal/el/dye)



Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

Opini Dosen /
Mahasiswa

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Barito Post

22 Januari 2026

Rekonstruksi Ungkap Detik-detik Pembunuhan Mahasiswi ULM

Banjarmasin mengge-
bunuhan mahasiswi
Mangkurat (ULM),
Rabu (21/1/2026).
gsung di Mapolresta
kap fakta bahwa ter-
polisi yang sudah
amad Seili, sempat
belum menghabisi
i keluarga korban,
n (LBH), perwakilan
nasin, serta sejumlah

instansi terkait. Dalam reka ulang tersebut, ter-
sangka memperagakan total 18 adegan, mulai
dari pertemuan hingga pembuangan jasad kor-
ban.

Kasat Reskrim Polresta Banjarmasin,
Kompol Eru Alsepa, mengatakan persetubuhan
terjadi pada adegan kelima, sementara aksi
pembunuhan berlangsung pada adegan
keenam hingga kedelapan.

"Ada 18 adegan, dari awal pertemuan sam-
pai penemuan jenazah di depan STIHSa. Pe-
mbunuhan terjadi pada adegan keenam

bersambung ke hal 05



REKONSTRUKSI kasus pembunuhan mahasiswi Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Zahra Dilla (21), Rabu (21/1/2026), di Mapolresta Banjarmasin. Tersangka pelaku yang sudah dipekat dari kepolisian, Muhammad Seili, memperagakan 18 adegan dalam rekonstruksi tersebut. (Foto: Arsuma)

Rekonstruksi Ungkap...

sampai kedelapan,"
ujar Eru kepada
wartawan di sela pelak-
sanaan rekonstruksi.

Ia menjelaskan, peristi-
wa bermula saat tersang-
ka dan korban berada di
kawasan Kilometer 14.
Saat itu terjadi percaka-
pan yang memicu emosi
tersangka. Ketika mobil
hendak dijalankan, kor-
ban menahan setir
kendaraan.

Tersangka lalu
mengambil borgol yang
berada di dekat rem tan-
gan dan memborgol tan-
gan kanan korban. Pada
adegan berikutnya, kor-
ban kembali menahan
setir sehingga tersangka
memborgol kedua tangan
korban. Korban sempat
melakukan perlawanan
dengan memukul paha
tersangka.

Pada adegan kedela-
pan, tersangka mencekik
leher korban dengan
kedua tangannya hingga
korban mengalami sesak
napas dan tidak berdaya,"
jelas Eru.

Melihat korban tak
lagi melawan, tersangka
diluputi kepanikan. Ia
kemudian membuang
tubuh korban ke dalam
got di kawasan kampus
Sekolah Tinggi Ilmu
Hukum Sultan Adam
(STIHSa) Banjarmasin.
Adegan pembuangan
diperagakan pada adegan
ke-10 hingga ke-13.

Saat ini, penyidik ter-
gah melengkapi berkas
perkara dan berita acara
hasil rekonstruksi untuk
diserahkan ke Kejaksaan
Negeri Banjarmasin.

BAP rekonstruksi hari
ini dimasukkan ke berkas,
lalu kami kirimkan ke
kejaksaan untuk peneli-
tian lebih lanjut," kata Eru.

Tersangka dijerat
pasal berlapis, yakni Pasal
338 KUHP tentang pem-
bunuhan dan Pasal 365

KUHP tentang pencurian
dengan kekerasan, den-
gan ancaman hukuman
maksimal 20 tahun pen-
jara.

Kasus menggegerkan
ini bermula dari dite-
muannya mayat perem-
puan di selokan sekitar
Kampus STIHSa
Banjarmasin, Rabu
(24/12/2025) pagi. Tak
lama, diketahui bahwa
perempuan korban pem-
bunuhan itu adalah Zahra
Dilla (21), mahasiswi
Fakultas Ekonomi dan
Bisnis ULM.

Dalam waktu kurang
dari 24 jam, jajaran Polda
Kalsel dan Polresta
Banjarmasin berhasil
membongkar kasus ini
dan meringkus pelakun-
ya, yakni Bripda
Muhammad Seili (21),
anggota
Polresta
Banjarbaru. Pembunuhan
itu diduga bermotif
asmara.

Dalam sidang Komisi
Kode Etik Polri (KKEP)
yang digelar Propam
Polda Kalsel, pada 29
Desember 2025,
terungkap setidaknya tiga
perempuan terlibat dalam
pusaran konflik tersebut.

Selain korban Zahra
Dilla, terdapat calon istri
tersangka berinisial DE
dan seorang perempuan
lain berinisial NO. Ketua
Majelis Sidang KKEP,
AKBP Budi Susanto,
menyebut konflik pribadi
ini menjadi latar belakang
pembunuhan yang terjadi
pada Rabu (24/12/2025)
dini hari.

Dalam pengakuannya,
Bripda Seili menyebut
dirinya terlibat
pertengkaran dengan
calon istrinya sejak
Agustus 2025. DE menud-
ing Seili berselingkuh
dengan NO.

Konflik kembali

Sambungan hal 1

memuncak menjelang
rencana pernikahan mere-
ka, direncanakan pada 26
Januari 2026. Dalam kon-
disi tertekan, tersangka
meminta bantuan Zahra,
sebagai teman DE, untuk
meluruskan persoalan
tersebut.

Seili dan Zahra kemu-
dian bertemu pada
malam kejadian, Selasa
(23/12/2025) malam.
Namun, di tengah per-
jalanan menuju rumah
calon istrinya, tersangka
dan korban justru
melakukan hubungan
badan di dalam mobil.
Situasi berubah
mencekam ketika korban
mengancam akan melap-
orkan perbuatan itu
kepada DE.

Dalam kondisi panik,
tersangka memborgol
kedua tangan korban.
Meski korban telah dibor-
gol, cekikan tetap
dilakukan hingga korban
kehilangan nyawa.

"Korban masih
melakukan perlawanan
dan tetap ingin melapor
ke calon istri tersangka.
Saat itulah tersangka
mencekik leher korban
selama beberapa menit,"
ungkap salah satu
penyidik dalam sidang
etik.

Tersangka mengaku
sempat berniat membawa
korban ke Rumah Sakit
Bhayangkara, namun di
tengah perjalanan korban
mengembuskan napas
terakhir. Jasad korban
kemudian ditemukan
petugas kebersihan di
gorong-gorong kawasan
Kampus STIHSa pada
pagi hari.

Dalam sidang etik,
Muhammad Seili telah
dijatuhi sanksi
Pemberhentian Tidak
Dengan Hormat (PTDH)
atau pemecatan dari insti-
tusi Polri ndy/mrs



Universitas
LAMBUNG MANGKURAT
Waja Sampai ka Puting



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK



Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

Opini Dosen /
Mahasiswa

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Barito Post

22 Januari 2026

Mahasiswa Fakultas Kehutanan I Sukses Praktik di PeFI Madiun

Banjarbaru, BARITO
a Fakultas Kehutanan
langkurat (ULM) suk-
raktik hutan tanaman
tani Forestry Institute
Madiun, Jawa Timur.

Departemen Learning Center
PeFI, mahasiswa didampingi
oleh dosen.

Kissinger mengatakan
program ini menjadi bagian
dari upaya ULM dalam meng-
hadirkan pembelajaran kon-
tekstual yang menghubungkan
teori akademik dengan praktik
pengelolaan hutan secara pro-
fesional.

Selama sepekan, maha-

siswa ULM mendapatkan
pembekalan komprehensif
terkait perencanaan risalah
hutan, budidaya tanaman jati,
teknik penebangan, hilirisasi
industri pengolahan kayu, pen-
gelolaan hasil hutan bukan
kayu (HHBK), hingga pema-
haman sejarah pengelolaan
hutan di Perhutani.

Materi tersebut dirancang
untuk memperkaya wawasan
dan keterampilan mahasiswa
dalam pengelolaan hutan tana-
man secara berkelanjutan.

Sang dekan juga men-
gapresiasi kemitraan yang ter-
jalin dengan PeFI Madiun,
karena telah memberikan pen-
galaman teknis sekaligus
menanamkan disiplin kerja

dan tata krama sebagai bekal
mahasiswa menghadapi
berbagai kondisi di lapangan
tanpa meninggalkan nilai-nilai
keilmuan.

Sementara Kepala
Perhutani Forestry Institute
Moch Farid Januardi
menyampaikan terima kasih
atas kepercayaan ULM yang
secara berkelanjutan men-
jadikan PeFI sebagai laborato-
rium lapangan mahasiswa
kehutanan.

Dia menyebut kolaborasi
ini bukan sekadar praktik
akademik, tetapi juga investasi
jangka panjang dalam meny-
iapkan sumber daya manusia
kehutanan.

ant



DEKAN Fakultas Kehutanan ULM Kissinger bersama mahasiswa yang mengikuti praktik hutan tanaman tahun 2026 di Perhutani Forestry Institute (PeFI), Madiun, Jawa Timur. (foto antara bnt)



Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

Opini Dosen /
Mahasiswa

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Barito Post

23 Januari 2026

Bunuh Istri Siri, Syamson- Divonis 20 Tahun Penjara



ISUN saat mendengarkan putusan majelis hakim yang dibacakan Kamis (22/1/2026).

Banjarmasin, BARITO

Kasus pembunuhan yang sempat menggemparkan warga Jalan Tembus Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan, akhirnya berujung pada putusan pengadilan.

Terdakwa M Syamson alias Isun (58) divonis pidana penjara selama 20 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin.

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang lanjutan yang digelar di Ruang Sidang Kartika PN Banjarmasin, Kamis (22/1/2026).

Majelis hakim yang diketuai Indra Meinanta Vidi SH menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana.

Dalam amar putusan-nya, majelis menilai perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan beren-

Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Masden Kahfi dari Kejaksaan Negeri Banjarmasin menyatakan masih pikir-pikir untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.

Vonis 20 tahun penjara ini lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup.

Diketahui, perkara ini bermula dari pembunuhan terhadap Mahdalena (47), istri siri terdakwa, yang terjadi pada Senin, 30 Juni 2025 siang, di Jalan Tembus Mantuil RT 24, Kelurahan Basirih Selatan.

Aksi kejahatan tersebut dipicu rasa cemburu terdakwa setelah melihat korban dibonceng pria lain.

Dalam kondisi emosi, terdakwa mendatangi rumah korban dengan membawa sebilah belati yang telah dipersiapkan sebelumnya.

cana, serta Pasal 351 ayat (2) KUHP mengenai penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

"Menjatuhkan pidana penjara selama 20 tahun kepada terdakwa M Syamson alias Isun," ujar Ketua Majelis Hakim saat membacakan putusan.

Selain pidana badan, majelis hakim juga memerintahkan barang bukti berupa senjata tajam jenis belati yang digunakan terdakwa dalam aksinya dirampas untuk dimusnahkan.

Atas putusan tersebut, terdakwa yang didampingi penasihat hukum Handayani dari LKBH Universitas Lambung Mangkurat (ULM) menyatakan menerima vonis majelis hakim.

Pertengkaran pun terjadi hingga akhirnya terdakwa menikam korban secara berulang kali, menyebabkan Mahdalena meninggal dunia di tempat kejadian perkara.

Selain korban tewas, anak Mahdalena bernama Siti Mahmudah (18) juga menjadi korban dan mengalami luka berat akibat serangan tersebut.

Tak lama setelah kejadian, aparat gabungan dari Unit Reskrim Polsek Banjarmasin Selatan, Opsnal Macan Rasta Satreskrim Polresta Banjarmasin, serta Subdit III Ditreskrimum Polda Kalimantan Selatan berhasil menangkap terdakwa untuk diproses hukum lebih lanjut. rif/mr's



Universitas
LAMBUNG MANGKURAT
Waja Sampai ka Puting



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK



Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

Opini Dosen /
Mahasiswa

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Radar Banjarmasin

23 Januari 2026

Bedah FS dan Pra-Desain Gedung Perpustakaan Daerah

Sekda Banjarbaru Tekankan Aspek Lingkungan

BANJARBARU – Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni, mewakili Wali Kota Hj. Erna Lisa Halaby, membedah paparan Feasibility Study (FS) dan pra-desain pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru, Rabu (21/1/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Tamu

Utama Wali Kota Banjarbaru.

Paparan rancangan desain disampaikan oleh tim arsitektur dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM), didampingi Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru, Asep Saputra. Dalam pemaparannya, tim menjelaskan konsep gedung perpustakaan yang dirancang sebagai pusat literasi digital sekaligus ruang rekreasi edukatif modern bagi masyarakat Banjarbaru.

Sekda Banjarbaru, Sirajoni me-

negaskan, bahwa pembangunan gedung tidak hanya berorientasi pada fungsi dan estetika, tetapi juga harus memperhatikan aspek ketahanan lingkungan. Ia secara khusus menyoroti pentingnya perencanaan sistem drainase dan resapan air dalam desain bangunan.

"Dalam membangun gedung, kita harus memikirkan resapan air. Ke mana air akan diresapkan atau dialirkan, sehingga ke depan tidak menimbulkan permasalahan luapan air saat musim hujan.

Hal ini harus menjadi perhatian serius kita bersama," ujarnya.

Menurut Sirajoni, perencanaan yang matang sejak tahap pra-desain akan menjadi kunci agar gedung perpustakaan nantinya benar-benar ramah lingkungan dan berkelanjutan. Ia berharap seluruh masukan yang disampaikan dalam pembahasan FS dan pra-desain ini dapat diakomodasi secara optimal sebelum masuk ke tahap pembangunan. (she/al/sbx)



MENYIMAK: Sekda Banjarbaru Sirajoni menyimak paparan FS dan pra-desain Gedung Perpustakaan Daerah, Rabu (21/1/2026).



BERSAMA: Sekda Banjarbaru Sirajoni bersama jajaran usai pembahasan FS dan pra-desain Gedung Perpustakaan Daerah, Rabu (21/1/2026).



PEMAPARAN: Tim arsitektur Universitas Lambung Mangkurat memaparkan desain Gedung Perpustakaan Daerah Banjarbaru, Rabu (21/1/2026).



Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

Opini Dosen /
Mahasiswa

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Banjarmasin Post

25 Januari 2026

Banyak Dosen PTS Bergaji di Bawah UMP

Banyak Dosen...

● Sambungan Hal 1

di dunia pendidikan tinggi, yakni kesejahteraan dosen, khususnya dosen Perguruan Tinggi Swasta (PTS), masih jauh dari kata layak.

Kondisi tersebut dibenarkan seorang mantan dosen PTS di Provinsi Kalimantan Selatan, yang enggan disebutkan identitasnya. Kepada BPost, dia mengaku pernah mengajar selama tujuh tahun dengan gaji jauh di bawah UMP, yang pada 2026 sebesar Rp 3.725.000 per bulan.

"Dulu saya digaji Rp 2 juta sampai Rp 3 juta per bulan. Jumlah itu disampaikan di awal sebelum tanda tangan kontrak," ujarnya.

Menurutnya, skema pengupahan dosen PTS sangat bergantung pada kemampuan yayasan. Saat itu, kebutuhan akan pekerjaan membuatnya tetap menerima gaji tersebut meski secara ekonomi jauh dari ideal.

"Ada juga dosen PTS yang sejahtera, tapi itu biasanya di kampus besar dengan yayasan yang kuat secara finansial. Jadi memang tergantung masing-masing PTS," katanya.

Untuk menyalasi kondisi tersebut, ia mengaku terpaksa mengambil pekerjaan tambahan sebagai dosen luar biasa di kampus lain.

Namun, sistem pengupahan dosen luar biasa pun tak menentu. "Ada yang dibayar bulanan, ada yang per semester. Nominalnya ratusan ribu per bulan sampai jutaan per semester. Itu pun tergantung kebijakan kampus," ujarnya.

Dia menilai gugatan sejumlah dosen ke MK merupakan langkah konstitusional. "Itu hak setiap dosen untuk memperjuangkan penghasilan yang layak. Harapan kami sederhana, dosen PTS bisa hidup sejahtera," katanya.

Dosen PTS lain yang juga enggan disebutkan namanya mengungkapkan realita serupa. Dia menyebut profesi dosen kerap dibungkus idealisme, kendati kondisi ekonomi pas-pasan.

"Secara status kami pendidik profesional, tapi secara penghasilan masih harus cari tambahan ke sana-sini. Ada yang ngajar di beberapa kampus sekaligus, ada juga yang ambil kerja sampingan di luar akademik," ujarnya.

Menurutnya, ketidakpastian standar gaji membuat posisi dosen PTS sangat rentan, terutama dosen muda yang belum memiliki jabatan fungsional. "Kalau tidak kuat idealisme, mungkin sudah banyak yang memilih keluar dari dunia kampus," katanya.

Rektor Universitas Muhammadiyah Banjarmasin (UMB), Khudzaifah Dimiyati,

mengakui gaji dosen di kampusnya belum sepenuhnya memenuhi standar UMP terutama dosen dengan status tertentu.

Dia merinci dosen baru yang masih berstatus kontrak dan dosen tetap yang belum memiliki jabatan fungsional masih menerima gaji di bawah UMP. Sementara itu, dosen tetap yang telah memiliki jabatan fungsional dinyatakan sudah digaji sesuai UMP. "Untuk sumber dana gaji dosen, kami masih mengandalkan dari SPP mahasiswa," ujarnya.

Ketimpangan kesejahteraan semakin terlihat jika dibandingkan dengan penghasilan dosen Aparatur Sipil Negara (ASN). Berdasarkan data yang didapat BPost melalui saluran Whatsapp dosenxplora, seorang dosen dengan jabatan Asisten Ahli dapat menerima total penghasilan Rp 11,4 juta per bulan, yang terdiri atas gaji pokok, tunjangan fungsional, tunjangan kinerja, serta tunjangan profesi.

Jumlah tersebut meningkat signifikan seiring kenaikan jabatan. Dosen dengan jabatan Lektor Kepala memperoleh penghasilan sekitar Rp 19,8 juta, sementara Guru Besar bisa menerima hingga Rp 30,6 juta, termasuk tunjangan kehormatan.

Reja Pahlevi, dosen Universitas Lambung Mangkurat (ULM), menjelaskan penghasilan dosen ASN ber-

asal dari beberapa komponen. "Dosen ASN punya gaji pokok sesuai golongan. Lalu ada tunjangan kinerja atau tukin, sertifikasi, dan tunjangan fungsional," ujarnya.

Menurut Reja, tukin menjadi pembeda paling signifikan. "Tukin dihitung secara persentase, ada 100 persen, 80, atau 60 persen, dan besarnya tergantung jabatan fungsional. Itu yang paling besar angkanya," katanya.

Dengan jabatan yang ia emban saat ini, Reja menyebut total penghasilannya berada di kisaran Rp 11 juta per bulan. Meski begitu, ia menegaskan tidak semua dosen ASN mendapatkan tukin.

"Tukin hanya ada di kampus yang masih satker atau BLU belum remunerasi. Kalau sudah BLU remunerasi atau PTNBH, dosen tidak lagi dapat tukin, tapi diganti dengan remunerasi," ujarnya.

Perbedaannya, lanjut Reja, terletak pada sumber pembiayaan. "Kalau tukin dibayar negara, remunerasi dibayar oleh universitas. Tapi sama-sama diukur dari kinerja dosen."

Sementara itu, terkait peluang beasiswa pendidikan lanjutan, Reja menilai tidak ada perbedaan antara dosen ASN dan swasta. "Untuk beasiswa sebenarnya sama saja. Tidak ada perbedaan ASN atau swasta," katanya. (msr/sul)

■ Gugat Aturan Gaji di MK

BANJARMASIN, BPOST - Gugatan Serikat Pekerja Kampus bersama Isman Rahmani Yusron dari Universitas Muhammadiyah Bandung dan Riski Alita Istiqomah dari Universitas Halim Sanusi PUI Bandung terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen berproses di Mahkamah Konstitusi. Dalam gugatan yang dilayangkan pada Desember 2025, mereka meminta aturan gaji dosen dan guru disesuaikan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) di wilayah masing-masing.

Hal ini membuka tabir persoalan lama



Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

Opini Dosen /
Mahasiswa

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Banjarmasin Post

25 Januari 2026

Master Plan Balangan Park Dipublikasikan

● Dikonsep untuk Rekreasi, Edukasi Hingga Konservasi

PARINGIN, BPOST - Pemerintah Kabupaten Balangan bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Lambung Mangkurat merencanakan pembangunan Balangan Park di wilayah Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan.

Rencana ini disampaikan dalam ekspose Master Plan Balangan Park oleh LPPM ULM yang disaksikan langsung oleh Bupati Balangan, Abdul Hadi bersama jajaran SKPD terkait serta sejumlah kepala desa pada Kecamatan Batumandi di Aula Benteng Tundakan, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Kamis (22/1).

Melalui ekspos master plan tersebut, diketahui Balangan Park akan dibangun di Desa Mantimin, Kecamatan Batumandi, Kabupaten Balangan. Luas lahan mencapai 47 hektar.

Balangan Park merupakan taman multifungsi dengan konsep rekreasi, edukasi dan konservasi. Tempat ini rencananya juga akan mendukung wisata keanekaragaman hayati berbasis potensi lokal.

Master Plan Balangan Park tersebut dipaparkan langsung oleh Tim Master Plan Balangan Park LPPM ULM, Beta Paramita. Ia menerangkan terkait rencana serta tujuan pengembangan dari Balangan Park.

Beberapa tujuan tersebut meliputi, menjadi wisata edukatif, konservatif dan kreatif pertama yang komprehensif di Balangan. Kemudian mendukung peningkatan ekonomi lokal dan pelestarian lingkungan serta menjadi ikon wisata alam dan tematik di Kalimantan Selatan.

Balangan Park direncanakan akan memiliki tempat parkir yang cukup luas, taman hiburan, auditorium, amphitheater, theme park, area kuliner, water garden, glamping area, gedung budaya, taman bunga, sekolah alam, observasi dan laboratorium, aviary park, Balangan zoo, petting zoo, pisces zoo serta hotel dan ruang Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE).

Terkait master plan tersebut, Bupati Balangan, Abdul Hadi menyampaikan pembangunan Kabupaten Balangan memiliki arah yang jelas, termasuk dalam rencana pembangunan Balangan Park yang sudah direncanakan dengan secara serius melakukan kajian dari kalangan



BALANGAN POST/ISTI ROHAYANTI

MASTER PLAN - Penyampaian master plan Balangan Park oleh tim LPPM Universitas Lambung Mangkurat di Aula Benteng Tundakan, Balangan.



BALANGAN POST/ISTI ROHAYANTI

BERI SAMBUTAN -Bupati Balangan, Abdul Hadi menyampaikan sambutan dalam acara ekspos konsep desain 2025 atau master plan Balangan Park di Aula Benteng Tundakan, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan.

akademis.

"Balangan Park ini didesain agar menjadi tempat tujuan orang datang, mengingat dampaknya yang baik bagi pertumbuhan PAD dan ekonomi masyarakat, termasuk sebagai upaya pemerintah daerah dalam melengkapi fasilitas umum," ujar Abdul Hadi.

Ia pun berharap ke depannya rencana untuk desain pembangunan di Kabupaten Balangan benar-benar terwujud, salah satunya melalui Bal-

angan Park yang didahului ekspos master plan.

Kehadiran Balangan Park direncanakan merogoh anggaran mencapai Rp562,6 M. Dimana rencana pembiayaannya akan ditawarkan kepada investor atau dengan bentuk kerjasama antara pemerintah daerah, CSR, akademisi, public private partnership, investasi dari swasta dan kerjasama antara swasta dan masyarakat. (ell/*)



Universitas
LAMBUNG MANGKURAT
Waja Sampai ka Puting



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK



Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

Opini Dosen /
Mahasiswa

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Banjarmasin Post

25 Januari 2026



ULM Gelar RTL Mantapkan Strategi IKU 2026

● **Rektor Tekankan Komitmen Akreditasi Internasional**

BANJARBARU, BPOST - Sebagai langkah strategis dalam menyelaraskan dan memantapkan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) universitas, Universitas Lambung Mangkurat (ULM) menggelar kegiatan Rencana Tindak Lanjut (RTL).

Kegiatan ini dilaksanakan, Kamis (22/1) di Grand Qin Hotel, Banjarbaru, dan dihadiri oleh seluruh pimpinan di lingkungan ULM.

Rektor ULM Prof Dr H Ahmad Alim Bachri SE MSI, hadir langsung dan memberikan paparan utama yang menyoroti refleksi capaian IKU ULM tahun 2025 sekaligus arah dan strategi pencapaian IKU tahun 2026.

Kegiatan ini menjadi forum penting untuk menyatukan langkah seluruh unit kerja dalam menghadapi perubahan formulasi IKU di tingkat kementerian.

"Kita di sini bersama-sama membicarakan rencana tindak lanjut IKU ULM dengan melihat refleksi capaian tahun 2025 dan mempersiapkan strategi menuju capaian IKU tahun 2026 yang akan datang," ujar Prof Ahmad dalam sambutannya.

Kegiatan RTL ini juga dihadiri oleh seluruh Wakil Rektor ULM, yang masing-masing memberikan paparan sekaligus memimpin diskusi terkait alat bukti indikator kinerja utama tahun 2026.

Diskusi berlangsung aktif dengan melibatkan pimpinan unit kerja tingkat universitas dan fakultas, para dekan, kepala lembaga, serta unit penunjang akademik, sebagai bagian dari upaya penyelarasan dan penguatan sinergi kelembagaan.

Dalam paparannya, Rektor menegaskan kembali komitmen universitas terhadap visi dan misi ULM, yakni menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya yang berkarakter kewirausahaan unggul ber-



KEGIATAN RTL - Universitas Lambung Mangkurat (ULM) menggelar kegiatan Rencana Tindak Lanjut (RTL). Kegiatan ini dilaksanakan, Kamis (22/1), di Grand Qin Hotel, Banjarbaru

basis lingkungan lahan basah.

Ia juga menekankan bahwa capaian IKU harus selaras dengan arah pengembangan institusi jangka panjang.

"ULM saat ini terus bergerak menuju akreditasi internasional. Alhamdulillah, beberapa program studi telah berhasil meraih akreditasi internasional melalui ASIIN dan IABEE, dan dalam waktu dekat akan menyusul visi-tasi akreditasi internasional ACQUIN untuk sembilan program studi di FKIP," ungkapnya.

Lebih lanjut, Rektor ULM menyampaikan, hingga saat ini ULM telah memiliki lebih dari 130 program studi, dan jumlah tersebut diproyeksikan meningkat menjadi sekitar 147 program studi pada tahun 2026, seiring dengan pembukaan program studi baru, termasuk pendidikan dokter spesialis, subspesialis, serta program PSDKU di beberapa kabupaten.

Menurutnya, peningkatan jumlah program studi tersebut menjadi tan-

tangan sekaligus tanggung jawab bersama, terutama dalam mendorong peningkatan mutu dan akreditasi program studi yang telah lama berdiri.

"Bukan sekadar menambah program studi, tetapi bagaimana kita memetakan program studi yang ada dan mendorongnya agar mencapai akreditasi unggul. Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama setelah rapat ini," tegasnya.

Melalui kegiatan RTL ini, Universitas Lambung Mangkurat menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan mutu akademik, serta merumuskan strategi pencapaian IKU yang adaptif dan terukur, khususnya dalam menghadapi perubahan kebijakan dan tantangan kinerja tahun 2026.

Kegiatan ini diharapkan menjadi pijakan bersama bagi seluruh unit kerja ULM dalam mewujudkan kinerja universitas yang unggul dan berkelanjutan. (ncl/*)

www.ulm.ac.id



Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

**Opini Dosen /
Mahasiswa**

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Banjarmasin Post

26 Januari 2026

Sesuaikan Omzet

KEBIJAKAN

pembayaran royalti musik melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) menandai penguatan rezim perlindungan hak cipta di Indonesia. Surat Edaran Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dan penguatan melalui Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) Nomor 27



ISTIMEWA
**Prof HANDRY
IMANSYAH**
Pakar Ekonomi
ULM

● Hal 5 kol 4-7

Sesuaikan Omzet

● Sambungan Hal 1

Tahun 2025 menegaskan bahwa pemutaran musik di hotel, restoran, kafe, pusat perbelanjaan, hingga transportasi merupakan pemanfaatan komersial yang wajib dikenakan royalti. Dari perspektif kebijakan publik, langkah ini memiliki implikasi ekonomi yang tidak sederhana.

Pertama, dampak terhadap usaha jasa. Bagi hotel, restoran, dan kafe—terutama skala kecil dan menengah—kewajiban royalti berpotensi menambah biaya operasional tetap. Pada usaha besar, tambahan biaya ini relatif kecil dan mudah diserap.

Namun bagi UMKM jasa, terutama kafe independen atau usaha kuliner lokal, royalti dapat menjadi fixed cost shock. Jika tidak disertai skema tarif proporsional, pelaku usaha bisa merespons dengan mengurangi pemutaran musik, menaikkan harga, atau bahkan menghindari kepatuhan. Dalam jangka pendek, ini berisiko menurunkan kualitas pengalaman konsumen dan daya saing usaha kecil.

Kedua, dampak terhadap perekonomian daerah. Secara teoretis, kebijakan ini bersifat redistributive yakni memindahkan sebagian surplus dari sektor jasa ke sektor kreatif (musisi). Jika berjalan baik, efek makro daerah bisa positif karena pendapatan musisi yang meningkat akan kembali dibelanjakan di ekonomi lokal.

Namun dalam praktik, terdapat risiko kontraproduktif bila beban royalti terlalu berat bagi UMKM jasa daerah. Daerah dengan dominasi usaha mikro (kota kecil, destinasi wisata baru) bisa mengalami perlambatan aktivitas usaha jika kebijakan diterapkan seragam tanpa mempertimbangkan struktur ekonomi lokal.

Ketiga, implikasi bagi kesejahteraan musisi. Dari sisi musisi, kebijakan ini secara normatif adalah langkah maju. Selama ini, musik banyak dimanfaatkan secara komersial tanpa kompensasi yang adil. Dengan sentralisasi melalui LMKN dan pengawasan DJKI, potensi peningkatan pendapatan musisi—terutama pencipta lagu—cukup signifikan. Namun, kesejahteraan musisi sangat bergantung pada transparansi distribusi, akurasi data penggunaan lagu, dan efisiensi LMK. Tanpa itu, royalti berisiko terkonsentrasi pada musisi besar saja.

yalti berisiko terkonsentrasi pada musisi besar saja.

Keempat, bagaimana penerapan agar tidak menjadi simalakama. Kunci keberhasilan kebijakan ini ada pada desain implementasi. Pertama, tarif royalti harus berjenjang dan proporsional berdasarkan skala usaha, omzet, dan intensitas pemutaran musik atau dalam bahasa ekonomi mikro adalah segmentasi. Kedua, perlu opsi simplified license atau paket murah untuk UMKM atau segmen bawah yang murah artinya sementara dibagi berdasarkan kemampuan membayar. Ketiga, transparansi penuh distribusi royalti—sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025—harus benar-benar dapat diaudit publik. Terakhir, sosialisasi harus bersifat edukatif, bukan represif.

Dengan pendekatan tersebut, kebijakan royalti musik berpotensi menjadi win-win solution: melindungi hak musisi sekaligus menjaga denyut pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan perekonomian daerah. Tanpa itu, kebijakan ini berisiko dipersepsi sebagai beban tambahan yang menghambat sektor jasa lokal dan kegiatan ekonomi daerah. (msr)



Universitas
LAMBUNG MANGKURAT
Waja Sampai ka Puting



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK



Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

Opini Dosen /
Mahasiswa

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Barito Post

26 Januari 2026

Bupati Balangan Abdul Hadi Fokuskan Masterplan Pembangunan Balangan Park



BARITO
Kabupaten (Pemkba) Focus Group Discussion Masterplan Pembangunan
Balangan menggelar (FGD) untuk membahas Balangan Park di Aula

Benteng Tundakan, Kantor Bupati Balangan, Paringin Selatan, Senin (22/1/2026).

Penyusunan masterplan ini merupakan hasil kerja sama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lambung Mangkurat (ULM), DPRD Balangan, serta perangkat daerah terkait. Kawasan Balangan Park direncanakan berlokasi di Desa Mantimin, Kecamatan Batumandil.

Bupati Balangan Abdul Hadi mengatakan, masterplan menjadi pedoman penting agar pembangunan Balangan Park berjalan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Menurutnya,

pengembangan Balangan Park diarahkan untuk menjadikan Kabupaten Balangan sebagai tujuan kunjungan yang mampu mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pertumbuhan ekonomi masyarakat, serta pengembangan fasilitas umum.

"Kita ingin Balangan menjadi daerah yang terbuka, ramai dikunjungi, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat," tegasnya.

Sementara itu, narasumber dari LPPM ULM Beta Pramita menjelaskan bahwa FGD berfungsi untuk menyerap masukan sekaligus mengukur kesiapan seluruh unsur terkait, baik pemerintah maupun masyarakat.

"Saat ini, pembahasan masih bersifat internal. Setelah semua siap, rencana ini akan dipublikasikan dan diwujudkan bersama," ujarnya.

Ia menambahkan, pembangunan Balangan Park dirancang berlangsung selama delapan tahun, dengan tahap awal difokuskan pada pembukaan lahan. Dari sisi konsep, kawasan ini mengusung tema biodiversitas yang menonjolkan kekayaan alam khas Kalimantan.

"Kami mengusulkan tagline 'Dan Balangan untuk Menjaga Dunia sebagai komitmen menjaga kelestarian alam,' tambah ia. (M.C. Balangan/dit/ol)



Universitas
LAMBUNG MANGKURAT
Waja Sampai ka Puting



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK



Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

Opini Dosen /
Mahasiswa

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Radar Banjarmasin

26 Januari 2026

PPKPP ULM Terakreditasi A, Pertama di Kalsel

JAKARTA – Pusat Penilaian Kompetensi dan Pelayanan Psikologi Universitas Lambung Mangkurat (PPKPP ULM) resmi meraih Akreditasi A sebagai lembaga asesmen center dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Capaian ini menjadikan PPKPP ULM sebagai satu-satunya asesmen center di bawah perguruan tinggi di Kalimantan Selatan yang memperoleh akreditasi tertinggi tersebut.

Sertifikat akreditasi diserahkan dalam Rapat Koordinasi dan Penyerahan Sertifikat Akreditasi Lembaga Asesmen Center Tahun 2025 yang berlangsung di Aula BKN Pusat, Jakarta, Kamis (23/1/2026).

Penyerahan dilakukan langsung oleh Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh kepada perwakilan Universitas Lambung Mangkurat, yakni Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Nieke Rezeki Febriantje dan Wakil Kepala PPKPP ULM Marina Dwi Mayangsari.

Akreditasi A menandakan PPKPP ULM telah memenuhi standar tertinggi penyelenggaraan asesmen sumber daya manusia, meliputi metodologi asesmen, kompetensi asesor, tata kelola kelembagaan, sarana prasarana, serta sistem penjaminan mutu. Dengan status ini, hasil asesmen PPKPP ULM dinilai sahih, objektif, dan sesuai standar nasional.

Wakil Kepala PPKPP ULM, Marina Dwi Mayangsari, menjelaskan akreditasi tersebut memberikan kewenangan penuh kepada ULM untuk melaksanakan asesmen aparatur sipil negara hingga level jabatan pimpinan tinggi pratama.

Secara strategis, asesmen center berperan penting dalam pemetaan kompetensi, pengembangan karier, promosi, mutasi, hingga penataan jabatan berbasis sistem merit. Capaian ini sekaligus memperkuat kontribusi ULM dalam penguatan kualitas SDM ASN serta menjadi mitra kredibel bagi pemerintah daerah, khususnya di wilayah Kalimantan dan nasional. (*dyt/al/ram)





Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

Opini Dosen /
Mahasiswa

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Radar Banjarmasin

26 Januari 2026

KECANDUAN DRAMA CHINA



Tokoh Tertindas Menang Telak Sangat Memuaskan

■ **KECANDUAN...**
Sambungan Hal 9

Plotnya mudah ditebak. Tapi justru di situlah candungnya. Penonton dibuat greget, emosinya diaduk, lalu dipuaskan dengan akhir epik ketika semua tokoh tunduk mengakui kekuasaan sang protagonis.

Fenomena ini tak hanya mengguncang Indonesia. Negara-negara Barat mulai meniru format serupa. Ironisnya, di negara asalnya sendiri, pemerintah China justru mulai memasang rem.

Administrasi Radio dan Televisi Nasional China (NRTA) kini membatasi genre romansa dengan tokoh CEO superkaya. Era cinta instan antara gadis biasa dan miliarder perlahan ditutup. Alasannya bukan semata soal selera, tapi dampak sosial jangka panjang.

Pemerintah China khawatir generasi muda membangun ekspektasi tidak realistis.

Seolah kekayaan adalah solusi semua masalah. Nilai kerja keras, kejujuran, dan realitas hidup dianggap perlu kembali ditonjolkan.

Lalu bagaimana dampaknya bagi anak muda Indonesia?

Mahasiswa Psikologi FKIK Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Rina, mengakui drama China memang terasa menarik, baik versi pendek maupun panjang. "Untuk istirahat dari dunia nyata yang tidak sesuai dengan ekspektasi dan banyak gedebak-gedebuknya," ujarnya, Sabtu (24/1).

Meski klise dan mudah ditebak, Rina menilai drama ini sukses menyedot emosi penonton. "Tak hanya menikmati, tapi menarik emosi penonton larut dalam cerita tersebut. Visualnya juga memanjakan mata (CGI) dengan variasi genre yang membuat penonton tidak mudah merasa bosan," tuturnya.

Ia mengaku sempat ikut berkhayal. Namun menurutnya,



Seolah mengeksploitasi cara kerja otak kita. Secara psikologis, menonton drama ini memberikan sensasi **Vicarious Gratification** (kepuasan perwakilan, red)."

AULIA NOOR ASUFIE
Mahasiswa Psikologi UMB

batas antara hiburan dan realita tetap harus dijaga. "Berkhayal itu boleh, asal seimbang yaitu dengan melihat realitas yang kita alami," tegas perempuan 23 tahun ini.



Tak hanya menikmati, tapi menarik emosi penonton larut dalam cerita tersebut. Visualnya juga memanjakan mata (CGI) dengan variasi genre yang membuat penonton tidak mudah merasa bosan."

RINA
Mahasiswa Psikologi FKIK ULM

Pandangan senada disampaikan Salia, mahasiswa Bimbingan dan Konseling FKIP Uniske MAB. Menurutnya,

drama China memang seru dan bikin penasaran. "Saat nonton itu sangat ngena, sesuai sama apa yang kita inginkan," ucapnya.

Namun, ia mengingatkan fiksi berlebihan bisa berbahaya jika membentuk ekspektasi hidup yang keliru. Karena itu, ia menilai pemerintah perlu berperan aktif. "Perlu edukasi, literasi media dan pengawasan konten. Bukan hanya sekadar melarang," ungkap dara 19 tahun ini.

Mahasiswa Psikologi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin (UMB), Aulia Noor Asufie melihat fenomena ini dari sudut psikologis yang lebih dalam. Menurutnya, drama China bukan sekadar hiburan, melainkan delusi realita yang dibungkus manis. "Seolah mengeksploitasi cara kerja otak kita. Secara psikologis, menonton drama ini memberikan sensasi **Vicarious Gratification** (kepuasan perwakilan, red)," ungkapnya.

Ia menyebut istilah **justice porn**,

momen memuaskan ketika tokoh tertindas tiba-tiba menang telak. Namun, durasi pendek dan konflik padat justru membuat penonton terus mengejar lonjakan dopamin. "Kesannya mungkin 'absurd', namun otak kita sulit menolak sensasi **justice porn**," tambah Aulia.

Ia khawatir, paparan berlebihan dapat menurunkan daya tahan generasi muda menghadapi realita hidup yang jauh lebih lambat dan kompleks. Bahkan berpotensi menciptakan **Cinderella Complex**—keyakinan bahwa masalah hidup akan selesai lewat keberuntungan, bukan usaha.

Jika pemerintah China saja bertindak, Aulia menilai Indonesia tak boleh abai. "Daripada melarang, lebih baik pemerintah memberikan literasi dan edukasi agar mampu membedakan fantasi dan realita logika yang terjadi melalui dukungan produksi lokal yang sehat," pungkasnya. (mr-162/az/dye)



Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

Opini Dosen /
Mahasiswa

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Banjarmasin Post

27 Januari 2026

Warga Klaim Pencemaran Tambang Lebih Luas

BATULICIN, BPOST - Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) resmi merilis hasil kajian mereka yang mencatat angka 82,82 hektare lahan terdampak limbah tambang, di Desa Sebambar Baru, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu, mulai terluak.

Polemik baru justru muncul karena adanya selisih data yang cukup signifikan dengan klaim masyarakat soal luasan lahan yang terdampak limbah tambang.

Dalam rapat kerja gabungan di Gedung DPRD Tanah Bumbu, Senin (25/1), Ketua Tim Studi Lingkungan Perairan PPLH ULM, Prof. Mijani Rahman, memaparkan angka 82,82 hektare tersebut merupakan hasil verifikasi berlapis.

"Kami menggunakan analisis citra satelit tahun 2010, 2019, dan 2021, lalu diperkuat dengan foto udara (drone) pada akhir 2025 serta pengamatan lapangan langsung," jelas Mijani.

Angka ini memang lebih ramping jika dibandingkan laporan warga yang menyebutkan kerusakan mencapai 120 hektare.

Dari total 82,82 hektare tersebut, rinciannya adalah, semak belukar, 51,30 hektare, kebun karet, 18,53 hektare, kebun sawi 12,70 hektare, dan kolam, 0,29 hektare.

Ketua Komisi II DPRD Tanah Bumbu, Andi Erwin Prasetya, langsung bereaksi atas paparan tersebut. Ia mengkhawatirkan klasifikasi lahan "semak belukar" yang mendominasi data PPLH akan membuat nilai ganti rugi menjadi rendah.

"Kami ingin masyarakat mendapat ganti rugi yang pantas. Faktanya, lahan tersebut sudah tidak bisa digunakan lagi akibat pencemaran. Jangan sampai selisih 37 hektare ini dan status semak belukar justru merugikan warga," tegas Andi Erwin.

Pencemaran di Sebambar Baru diduga kuat berasal dari aktivitas tambang batu bara yang meluap ke aliran sungai. Dampaknya meluas secara sistematis, dari kebun produktif yang mati, permukiman yang tak lagi nyaman, hingga usaha sarung burung walet yang terganggu.

Di sisi lain, birokrasi menjadi kendala. Kabid Perataan dan Peningkatan Kapas-

tas Lingkungan Hidup DLH Tanah Bumbu, Syahrojat, menyebut kewenangan penindakan perusahaan ada di tangan pemerintah pusat.

Ia juga mengingatkan pada 2022 sempat ada kesepakatan ganti rugi Rp25 juta per hektare, namun dituntut oleh warga sendiri.

DLH sendiri, sebut Syahrojat, merupakan pihak tengah, antara warga dan perusahaan. Di tuntutnya Tim Studi Lingkungan Perairan PPLH ULM oleh DLH karena atas kesepakatan oleh warga dan perusahaan terkait luasan lahan yang terdampak ini.

Saat ini, meski data luasan sudah tersedia, angka nominal ganti rugi masih menjadi misteri. PPLH ULM menyutakan perlu kehati-hatian ekstra agar perhitungan nilai ekonomi lahan tidak cacat secara hukum maupun keadilan.

Rapat selanjutnya akan dijadwalkan kembali. Pertemuan tersebut akan mempertemukan secara langsung pihak perusahaan, pemerintah, dan masyarakat untuk menentukan harga atas kerusakan lingkungan yang telah terjadi selama bertahun-tahun. (ria)



PERTEMUAN - Rapat kerja DPRD gabungan di Gedung DPRD Tanah Bumbu, Senin (25/1).



Universitas
LAMBUNG MANGKURAT
Waja Sampai ka Puting



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK



Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

Opini Dosen /
Mahasiswa

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Banjarmasin Post

27 Januari 2026



SYUKURAN - Suasana kegiatan syukuran dalam rangka pembukaan enam prodi di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat, Senin (26/1).

Target Terima Mahasiswa Mulai Semester Depan

● ULM Buka 6 Prodi Baru di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

BANJARMASIN, BPOST – Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) menggelar kegiatan syukuran dalam rangka pembukaan enam Program Studi (Prodi) baru bidang kedokteran.

Rektor ULM, Prof Ahmad Alim Bachri menyampaikan, enam prodi baru tersebut terdiri dari lima Program Pendidikan Dokter Spesialis dan satu Subspesialis.

Prodi yang dibuka meliputi Patologi Klinik Program Spesialis, Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Program Spesialis, Patologi Anatomi Program Spesialis, Radiologi Program Spesialis, Urologi Program Spesialis, serta Penyakit Dalam Program Sub Spesialis.

Pembukaan prodi baru ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat Kalimantan Selatan untuk melanjutkan pendidikan dokter spesialis dengan biaya yang lebih terjangkau.

"Sekaligus meningkatkan ketersediaan sumber daya manusia kedokteran di daerah," kata Prof Ahmad, Senin (26/1).

Lebih lanjut Prof Ahmad menjelaskan, inisiatif pembukaan prodi tersebut merupakan bagian dari kerja sama antara Kementerian Kesehatan bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dengan perguruan tinggi negeri di Indonesia.

"Semoga Prodi baru ini mampu memperkuat SDM kedokteran di Kal sel dan membantu mengatasi kekurangan dokter spesialis," jelasnya.

Sementara itu Dekan FKIK ULM, Prof Syamsul Arif menambahkan, pihak telah melakukan rapat koordinasi untuk menindaklanjuti izin operasional enam prodi baru tersebut.

Ia menjelaskan, persiapan yang dilakukan meliputi penyusunan pedoman akademik serta pemenuhan sumber daya manusia, terutama kelengkapan data untuk memenuhi persyaratan akreditasi minimal.

"Kami menargetkan penerimaan mahasiswa baru selambat-lambatnya semester depan," ujarnya.

Penerimaan mahasiswa baru diharapkan dapat dimulai paling lambat bulan Mei 2026, dengan informasi yang akan segera disebarluaskan.

Prof Syamsul Arif menambahkan, minat terhadap enam prodi baru tersebut diperkirakan tinggi, karena sebagian besar program hanya tersedia di Kalimantan.

"Ini menjadi peluang besar bagi putra-putri daerah untuk menempuh pendidikan dokter spesialis tanpa harus ke luar pulau," ucapnya. (mel/*)



www.ulm.ac.id



Universitas
LAMBUNG MANGKURAT
Waja Sampai ka Puting



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK



Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

Opini Dosen /
Mahasiswa

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Banjarmasin Post

27 Januari 2026



SILATURAHMI - Universitas Lambung Mangkurat (ULM) melaksanakan kegiatan Penanaman Bibit dan Silaturahmi ULM dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), di kawasan IKN, Senin (26/1).

ULM Tanam 749 Bibit di Kawasan IKN

• Bentuk Dukungan Pembangunan Berkelanjutan

PENAJAM, BPOST - Universitas Lambung Mangkurat (ULM) melaksanakan kegiatan Penanaman Bibit dan Silaturahmi ULM dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kegiatan ini berlangsung di kawasan IKN, Senin (26/1), dan menjadi bagian dari komitmen ULM dalam kontribusi lingkungan, penguatan sumber daya manusia, serta pengabdian kepada masyarakat.

Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Universitas Lambung Mangkurat dan diikuti oleh jajaran pimpinan ULM, perwakilan Otorita IKN, sivitas akademika, serta para alumni ULM yang kini berkiprah sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan IKN.

Rektor ULM yang diwakili oleh Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Sistem Informasi, Dr Ir Yusuf Azis MSi dalam sambutannya menyampaikan bahwa ULM membawa sebanyak 749 batang bibit tanaman untuk ditanam

di kawasan IKN. Penanaman ini merupakan simbol sekaligus langkah konkret kontribusi ULM dalam pembangunan berkelanjutan di Kalimantan.

"Hari ini kita melakukan penanaman bibit yang merupakan bagian dari jenis tanaman yang ada di Kalimantan Selatan. Selain melihat langsung progres perkembangan IKN, ULM sebagai perguruan tinggi negeri tertua di Kalimantan Selatan dituntut untuk memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan IKN," ungkap WR IV.

Lebih lanjut disampaikan, kontribusi ULM tidak hanya terbatas pada aspek lingkungan, tetapi juga pada penguatan sumber daya manusia, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ia juga mengapresiasi sejumlah alumni ULM yang telah berhasil lulus dan berkontribusi sebagai ASN di lingkungan IKN.

"Tentunya ULM terus dituntut untuk berperan aktif dalam mendukung pembangunan IKN, baik melalui penyediaan SDM unggul, riset yang re-

levan, maupun program pengabdian masyarakat yang berdampak langsung," tambahnya.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan Otorita IKN, Lazuardi Nasution selaku PH Deputy Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam, Alimuddin selaku Deputy Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat, serta Onesimus Pantung selaku Direktur Pengembangan Pemanfaatan Kehutanan dan Sumber Daya Air.

Hadir pula staf dari Direktorat Pengembangan Pemanfaatan Kehutanan dan Sumber Daya Air serta Direktorat Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana.

Melalui kegiatan ini, ULM menegaskan komitmennya sebagai institusi pendidikan tinggi yang tidak hanya berperan dalam bidang akademik, tetapi juga aktif berkontribusi dalam agenda strategis nasional, khususnya pembangunan Ibu Kota Nusantara yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. (mel/*)



Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

Opini Dosen /
Mahasiswa

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Barito Post

27 Januari 2026

Polres HSS Rekonstruksi Kasus Pembunuhan Mayat tanpa Kepala



PENYIDIK Satreskrim Hulu Sungai Selatan (HSS) memperagakan beberapa adegan kasus pembunuhan korban Jumaidi (40), warga Desa Ulang, Kecamatan Loksado, HSS, Kalimantan Selatan, Jumat (23/1/2025). (foto: antara)

Kandangan, BARITO

Penyidik Satreskrim Polres Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan korban Jumaidi (40), warga Desa Ulang, Kecamatan Loksado oleh tersangka AR (28), warga Bukit Tindihan, Desa Hariyan Dayak, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST).

Rekonstruksi dipergakan oleh personel polisi yang memperagakan 50 adegan peristiwa pembunuhan hingga penemuan mayat korban tanpa kepala oleh warga, menghadirkan pelaku AR, disaksikan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) HSS, kuasa hukum dan kedua belah pihak keluarga tersangka dan korban di

Kandangan, Jumat

"Hari ini kita telah melakukan rekonstruksi peristiwa pidana kasus pembunuhan warga Desa Ulang, Kecamatan Loksado," kata Kapolres HSS AKBP Awaluddin Syam melalui Kasar Reskrim Iptu May Pelly Mamuning.

Diterangkan Pelly, rekonstruksi reka ulang merupakan bagian penyidikan sesuai dengan keterangan para saksi, dengan 50 adegan dengan 12 orang saksi.

"Semua adegan dalam rekonstruksi sesuai dengan keterangan berita acara para saksi-saksi. Jika ada pihak-pihak yang keberatan, bisa disampaikan ke pengadilan atau pra peradilan," ujar Pelly.

Kuasa hukum keluarga korban yang juga Koordinator LKBH UNLAM HSS Rahiyatul Qiftiah, men-

versi tim penyidikan Polres HSS yang telah melakukan penyelidikan, dan penyidikan kasus pembunuhan yang terjadi.

"Dalam rekonstruksi tertulis," tuturnya, a-

reka ulang ini, kan akan melakukan b tapi kalau ada tidak-ian dengan hasil ber akan disampaikan



Universitas
LAMBUNG MANGKURAT
Waja Sampai ka Puting



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK



Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

Opini Dosen /
Mahasiswa

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Radar Banjarmasin

27 Januari 2026

Langkah Besar ULM, Resmi Buka Enam Prodi Spesialis dan Subspesialis

BANJARMASIN - Universitas Lambung Mangkurat (ULM) menggelar syukuran pembukaan enam program studi baru di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK), Senin (26/1/2026) di Banjarmasin. Kegiatan ini ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Rektor ULM Prof. Dr. H. Ahmad Alim Bachri, SE, MSI, bersama dekan serta jajaran pimpinan fakultas dan program studi FKIK ULM.

Syukuran digelar sebagai ungkapan rasa syukur atas terbitnya izin pendirian lima Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dan satu Program Subspesialis di FKIK ULM. Keenam program tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 76/B/O/2026.

Adapun program studi yang resmi dibuka meliputi Spesialis Patologi Klinik, Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Medik, Spesialis Patologi Anatomi, Spesialis Radiologi, Spesialis Urologi, serta Subspesialis Penyakit Dalam.

Rektor ULM Prof. Dr. H. Ahmad Alim Bachri menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas capaian FKIK ULM yang dinilai strategis, tidak hanya bagi universitas, tetapi juga bagi penguatan layanan kesehatan nasional, khususnya di wilayah Kalimantan dan Indonesia bagian luar Jawa.

"ULM mendapat kepercayaan besar dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk membuka program pendidikan dokter spesialis. Di regional Kalimantan, perguruan tinggi lain rata-rata hanya memperoleh satu program, sementara ULM dipercaya membuka enam program sekaligus," ujarnya.

Rektor menambahkan, pembukaan Program Subspesialis Penyakit Dalam merupakan yang pertama kali dimiliki FKIK ULM. Dengan demikian, jumlah program pendidikan dokter spesialis di FKIK ULM kini bertambah menjadi 14 program studi. Capaian tersebut menegaskan ketetapan ULM dari sisi sumber daya manusia dan sarana prasarana dalam mengembangkan pendidikan dokter spesialis.

Kebijakan pembukaan program ini, lanjut Rektor, sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia agar perguruan tinggi yang memiliki fakultas kedokteran diberikan kesempatan membuka pendidikan dokter spesialis sesuai kapasitas dan kualitas SDM. ULM dinilai sebagai salah satu perguruan tinggi yang memperoleh kepercayaan besar dalam kebijakan tersebut.

"Harapannya, ketimpangan distribusi dokter spesialis di berbagai daerah dapat dikurangi. ULM diharapkan menjadi episentrum pengembangan pendidikan kedokteran spesialis, khususnya untuk



ARAHAN: Rektor Universitas Lambung Mangkurat Prof. Dr. H. Ahmad Alim Bachri SE MSI menyampaikan arahan pada syukuran pembukaan enam program studi spesialis dan subspesialis FKIK ULM di Banjarmasin, Senin (26/1/2026).



POTONG TUMPENG: Rektor ULM Prof. Dr. H. Ahmad Alim Bachri menyerahkan potongan tumpeng pertama kepada Dekan FKIK ULM Prof. Dr. dr. Syamsul Arifin pada syukuran pembukaan enam program studi baru, Senin (26/1/2026).

wilayah di luar perkotaan," tegasnya.

Meski demikian, Rektor mengingatkan bahwa capaian tersebut juga menjadi tantangan bagi ULM dan FKIK, mulai dari proses penerimaan mahasiswa, persiapan akreditasi, hingga penguatan kualitas sumber daya manusia pendukung di masing-masing program studi.

"Kepercayaan ini harus dijawab dengan kerja nyata. Kita dituntut menjaga mutu pendidikan, menyiapkan akreditasi, serta memastikan keberlanjutan pengembangan SDM," imbuhnya.

Rektor juga mendorong pemanfaatan skema beasiswa, baik dari pemerintah daerah maupun LPDP bagi calon mahasiswa program spesialis. Selain itu, koordinasi lanjutan dengan Kementerian Kesehatan serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi terus diperkuat, termasuk mendorong dosen bergelar doktor di FKIK ULM untuk mengisrukan jabatan guru besar.

Melalui pembukaan enam program studi baru ini, Universitas Lambung Mangkurat menegaskan komitmennya dalam mendukung pemenuhan kebutuhan dokter spesialis nasional serta memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam pengembangan pendidikan kedokteran yang bermutu dan berdampak luas bagi masyarakat. (day/al/sbx)



Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

Opini Dosen /
Mahasiswa

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Radar Banjarmasin

27 Januari 2026

MBG dan Semangat Cinta Pertanian

PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah pusat, patut diapresiasi positif sebagai upaya memenuhi kebutuhan dasar makanan bergizi anak sekolah. Diharapkan terwujud anak masa depan yang sehat dan cerdas.

Berbagai komentar pasti terus akan terjadi antara yang setuju dan menolak, namun realita anak-anak bersorak gembira saat menyambut makan bersama di sekolah. Memang, masalah kekurangan gizi pada anak ditentukan oleh banyak faktor dan solusinya juga tidak bisa hanya dengan makan siang gratis, namun perhatian pemerintah perlu di apresiasi semua pihak.

Dahulu anak berangkat sekolah tanpa makan karena makanan yang dimakan belum tersedia tidak menjadi perhatian, namun sekarang adanya program pemeriksaan rutin kesehatan siswa sekolah terbukti anak kurang gizi masih banyak. Pemerintah berani mengeluarkan anggaran besar untuk 80 juta anak sekolah, tanpa kecuali disatukan dalam satu kebijakan hebat MBG dengan menggelontorkan anggaran negara sekitar Rp. 335 triliun per tahun. Tentu akibat semua ini pasti ada program sektor pendidikan yang jadi korban.

Asupan gizi yang cukup memang sangat penting bagi tumbuh kembang anak, penunjang kemampuan belajar, kecerdasan dan kesehatan jangka panjang. Berjalannya MBG memang sudah terlihat akan mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi sebagian keluarga yang masih kondisi kekurangan ekonomi sehingga akses terhadap makanan bergizi sebelumnya hanya angan dan sulit di realisasikan akan mudah didapat tanpa perjuangan. Sekolah juga berlomba mendapatkan

MBG walau tak mau dikatakan anak didiknya kekurangan gizi.

Tak mungkin bisa dipungkiri bahwa adanya MBG ada pihak yang dituntaskan dan ada juga pihak yang merasa di rugikan. Namun perlu disadari bahwa citra makan gratis sesungguhnya akan tetap dibayar pada masa depan generasi penerus negeri ini. Generasi penikmat makan gratis akan membayar saat ketika dewasa nanti.

Semakin maju peradapan kehidupan manusia maka tuntutan makanan berkualitas juga semakin meningkat. Dulu manusia asal bisa makan, tapi sekarang manusia milenial bukan lagi asal kenyang tapi makanan harus berkualitas. Nasi, sayur, dan buah yang di makan setiap hari harus berkualitas dengan label organik sebagai jaminan sehat dan menyehatkan manusia yang mengkonsumsinya.

Makanan bergizi memang terdengar indah dan menyenangkan, namun harus juga mendapatkan perhatian serius petinggi negeri ini bahwa Program MBG tidak serta-merta membangun pemahaman anak didik tentang dari mana makanan berasal, bagaimana makanan diproduksi, dan mengapa pangan harus dihargai. Tanpa fondasi tersebut, MBG berisiko berhenti sebagai kegiatan bagi-bagi makanan, bukan sebagai pendidikan menciptakan generasi milenial yang sukses karena perjuangan. Terbukti makanan gratis yang tidak dihabiskan karena tidak sesuai selera maka banyak makanan ternsia yang akhirnya bertumpuk di tempat sampah dibuang siswa dengan tanpa ada penyesalan dan rasa sayang.

MBG adalah langkah awal yang baik, namun tanpa diopang oleh pendidikan cinta pertanian maka program ini hanya



Gie h

PROF. DR. IR. H. ISMED SETYA BUDI, MS., IPM

menyentuh permukaan masalah. Jika pemerintah benar-benar ingin menyilapkan generasi sehat dan mandiri, maka MBG harus berjalan seiring dengan penanaman nilai pertanian berkelanjutan sejak dini pada siswa didik.

Program MBG memberi manfaat langsung, tapi harapan MBG menjadi jembatan emas menuju Indonesia emas 2045 masih perlu dipertanyakan. Makan gratis itu tak bisa terus berjalan karena semuanya memerlukan anggaran yang tidak kecil. Makanya MBG harus juga dikaitkan dengan menumbuhkan kebangkitan pola pikir bahwa makan itu hasil dari perjuangan petani yang menanam, memelihara dan panen.

Solusi yang lebih berkelanjutan adalah menjadikan MBG sebagai pintu masuk pendidikan pertanian. Sekolah dapat dilibatkan untuk membuat kebun kecil, mengenalkan jenis tanaman pangan, dan mengonsumsi hasil tanam yang sudah di perjuangan sendiri dengan menanam, memelihara dan panen sendiri. Anak akan menikmati hasil perjuangannya yang sudah bersusah

payah di tanam di halaman sekolah atau rumah dan akhirnya dinikmati sendiri oleh siswa setelah panen tiba.

Kesadaran siswa makanan itu hasil kerja berat maka akan harus dihabiskan bukan lagi dibuang bila tidak sesuai selera. Secara ilmiah dan sosial, pendidikan pertanian sejak dini membentuk anak yang menghargai pangan, peduli lingkungan, dan tidak bergantung sepenuhnya pada bantuan. Dengan demikian, MBG berubah dari program konsumsi menjadi proses pembelajaran untuk bekal siswa lebih mencintai pertanian di negeri ini.

Cinta pertanian sejak dini perlu mendapat perhatian serius semua pihak. Perlu membangkitkan kesadaran sejak dini peranan penting pertanian untuk kehidupan. Realita pertanian masih menjadi sumber utama pangan belum tergantikan. Sayur, buah, nasi, telur, dan lauk yang disajikan dalam program MBG semuanya berasal dari hasil pertanian dan peternakan yang di-perjuangkan untuk bisa sampai dipanen. Ironisnya, aspek ini sering tidak disampaikan kepada anak. Anak menikmati makanan, tetapi tidak diajak mengenal proses menanam, merawat, dan memanen bahan pangan. Akibatnya, anak kenyang tetapi tidak belajar menghargai pangan dan petani. Menyadarkan generasi muda diharapkan akan menjadi awal perubahan pola pikir. Anak sekolah saat ini adalah mereka yang sedang belajar berpikir masa depan karena semua harus melewati perjuangan untuk bisa menjadi pemenang unggul masa depan.

Di sinilah pentingnya mengaitkan MBG dengan pendidikan cinta pertanian sejak dini. MBG seharusnya tidak hanya menyenangkan perut, tetapi juga mengisi pengetahuan dan sikap

anak. Anak perlu tahu bahwa makanan sehat tidak muncul begitu saja, melainkan melalui kerja petani dan pentingnya mempertahankan produktivitas dengan keseimbangan alam tetap terjaga. Tuntutan makan berkualitas sudah tidak bisa diurda lagi. Makan asal kenyang sudah mulai ditinggalkan tapi mulai tumbuh berkembang makan yang sehat dan menyehatkan. Disinilah penting bertani secara organik agar bahan makanan yang dikonsumsi tidak mengandung pestisida dan bahan beracun yang membahayakan manusia yang mengkonsumsinya.

Salah satu cara menumbuhkan cinta pertanian sejak dini adalah dengan mengenalkan kegiatan bertani yang sederhana dan menyenangkan. Anak-anak bisa diajak menanam sayur di pot, botol bekas, atau halaman rumah. Kegiatan ini mengajarkan bahwa tanaman membutuhkan tanah, air, dan perawatan agar bisa tumbuh dengan baik.

Sekolah juga dapat membuat kebun kecil sebagai sarana belajar. Dari kebun sekolah, anak-anak belajar bersabar, bertanggung jawab, dan menghargai alam. Selain itu, anak bisa memahami bahwa sisa makanan dan daun kering dapat diolah menjadi pupuk alami yang baik untuk tanaman berproduksi sehat. Cinta pertanian sejak dini bukan berarti semua anak harus menjadi petani, tetapi anak belajar menghargai alam dan sumber makanan. Dengan mengenal pertanian sejak kecil, anak akan tumbuh menjadi pribadi yang peduli, bertanggung jawab, dan cinta lingkungan. Jadi pertanian bukan hanya tentang menanam, tetapi tentang menjaga kehidupan. (*/al/ram)

Prodi Proteksi Tanaman
Faperta ULM



Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

Opini Dosen /
Mahasiswa

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Barito Post

28 Januari 2026

ULM Cetak 15 Dokter Spesialis dan 44 Dokter Baru

Banjarmasin, BARITO

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) mencetak sebanyak 15 dokter spesialis baru dari enam program studi spesialis serta 44 dokter baru yang dikukuhkan secara langsung oleh Rektor ULM Prof Ahmad Alim Bachri, Senin di Banjarmasin.

Pengambilan sumpah dan penyerahan brevet dipimpin oleh Dekan FKIK ULM Prof Syamsul Arifin disaksikan oleh jajaran pimpinan FKIK.

Rektor mengatakan momentum ini menjadi penanda penting kontribusi ULM dalam mencetak tenaga medis profesional yang beretika, kompeten, dan berorientasi pengabdian.

Dia menyampaikan apresiasi dan kebanggaan atas capaian para lulusan, sekaligus menegaskan bahwa kelulusan ini bukan akhir perjalanan, melainkan awal pengabdian yang lebih luas bagi masyarakat.

"Hari ini kalian telah menyelesaikan satu babak, namun bukan berarti perjuangan tersebut berhenti di titik hari ini," ujar rektor.

Dalam kesempatan ini rektor juga menyampaikan bahwa FKIK ULM saat ini telah resmi mendapat izin untuk menambah enam program studi baru, terdiri atas lima program pendidikan dokter spesialis dan satu program subspecialis.



REKTOR ULM Prof Ahmad Alim Bachri memberikan ucapan selamat kepada dokter yang baru dikukuhkan. (foto antara/bri)

Capaian tersebut menempatkan ULM sebagai salah satu perguruan tinggi negeri di Kalimantan yang dipercaya menyelenggarakan pendidikan dokter spesialis melalui sinergi lintas kementerian.

"Maka dari itu, artinya ULM diberi kepercayaan besar oleh pemerintah untuk membuka pendidikan dokter spesialis, sebuah kehormatan sekaligus tantangan yang harus dijawab dengan kualitas dan tanggung jawab," ucapnya.

Sementara Dekan FKIK ULM Prof Syamsul Arifin menyampaikan keberhasilan para lulusan tidak terlepas

dari dukungan ekosistem pendidikan kedokteran yang kuat, termasuk rumah sakit pendidikan dan fasilitas kesehatan mitra ULM.

"Dalam profesi dokter, kalian akan hidup dalam paradoks: tegas namun penuh belas kasih, objektif namun tetap manusiawi," tuturnya.

Ia juga mengumumkan lulusan terbaik dokter spesialis dengan masa studi tercepat dan IPK tertinggi diraih oleh dr. Akhmad Fauzan, Sp.B., dari Program Studi Spesialis Penyakit Dalam, serta lulusan terbaik dokter diraih oleh dr. Alfyonika Oktaviani br.Bukit dengan IPK 3,75.

Perwakilan dokter baru, dr. Raditya, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada ULM, para dosen, wahana pendidikan, serta keluarga yang telah kebersamaan proses panjang dan penuh perjuangan selama pendidikan.

"Kami bisa berdiri di sini bukan karena kami kuat semata, tetapi karena kami tidak pernah dibiarkan berjalan sendiri. Ilmu, keteladanan, dan nilai kemanusiaan yang kami terima akan kami bawa dalam setiap pengabdian," ungkapnya.

Hal senada disampaikan Kabid Pelayanan Medik RSUD Ulin, Yoyi Farizah, M.Kes, yang menegaskan momentum ini merupakan tonggak awal pengabdian para dokter dan dokter spesialis untuk mengimplementasikan ilmu bagi bangsa dan negara dengan menjunjung tinggi etika dan empati.

Melalui kegiatan ini, ULM menegaskan komitmennya dalam memperkuat pendidikan kedokteran, meningkatkan mutu akreditasi program studi, serta membangun ekosistem layanan kesehatan berbasis pendidikan yang unggul.

ULM optimistis, para lulusan FKIK akan menjadi duta almamater yang menjaga nama baik universitas sekaligus berkontribusi nyata bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Banua dan Indonesia. **ant**



Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

Opini Dosen /
Mahasiswa

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Radar Banjarmasin

28 Januari 2026





Universitas
LAMBUNG MANGKURAT
Waja Sampai ka Puting



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK



Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

Opini Dosen /
Mahasiswa

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Radar Banjarmasin

28 Januari 2026

Universitas Lambung Mangkurat



FOTO: FOTO ULM UNTUK RUMAH BANGKALAH

SILATURAHMI: Bupati Tabalong Ir HM Noor Rifani bersama Wakil Rektor ULM dan seluruh hadirin saat mengikuti kegiatan Ramah Tamah dan Silaturahmi di Aula Dandung Suchrowardi, Kabupaten Tabalong, Minggu (25/1).

Bahas Rencana Pembukaan PSDKU Fakultas Teknik

TANJUNG – Universitas Lambung Mangkurat (ULM) bersama Pemerintah Kabupaten Tabalong membahas rencana pembukaan Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Fakultas Teknik ULM di Kabupaten Tabalong dalam kegiatan Ramah Tamah dan Silaturahmi di Aula Dandung Suchrowardi, Minggu (25/1).

Kegiatan yang digelar Pemerintah Kabupaten Tabalong tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam menyiapkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi wilayah.

Hadir dalam kegiatan ini Bupati Tabalong Ir H Muhammad Noor Rifani SH ST MT, jajaran perangkat daerah, serta pimpinan Universitas Lambung Mangkurat, di antaranya Wakil Rektor I, III, dan IV, para dekan fakultas, pimpinan pascasarjana, kepala unit penunjang akademik, dan sivitas akademika ULM.

Bupati Tabalong dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas komitmen ULM dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia di daerah. Ia menyebutkan, kerja sama yang telah berjalan saat ini melibatkan sekitar 1.000 putra-putri daerah melalui berbagai program kolaborasi pendidikan.

"Ke depan, kami berharap kerja sama ini semakin kuat, terutama melalui rencana pembukaan



PLAKAT: Wakil Rektor I ULM Dr dr Iwan Afiane menyerahkan plakat kenang-kenangan kepada Bupati Tabalong Ir HM Noor Rifani SH ST MT, didampingi Wakil Rektor III dan Wakil Rektor IV ULM.

PSDKU Fakultas Teknik ULM di Kabupaten Tabalong yang sangat dibutuhkan untuk mendukung potensi daerah," ujarnya.

Menurut Bupati, keberadaan PSDKU di Tabalong diharapkan dapat memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat sekaligus menyiapkan tenaga kerja terampil yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Sementara itu, Wakil Rektor I ULM Dr dr Iwan Afiane menegaskan bahwa rencana pembukaan PSDKU merupakan wujud komitmen ULM dalam menjawab kebutuhan riil masyarakat dan daerah.

"PSDKU tidak dibangun atas keinginan sepihak. Program studi yang dibuka harus benar-benar berdasarkan kebutuhan paling relevan dengan potensi daerah, termasuk Tabalong," tegasnya.

Ia menambahkan, pengembangan PSDKU tidak dapat dilakukan secara mandiri oleh perguruan tinggi, melainkan membutuhkan dukungan dan kolaborasi yang kuat dari pemerintah daerah.

"Pengembangan PSDKU harus dilakukan bersama. Melalui forum ini, kami berharap lahir gagasan-gagasan yang membumi dan bisa segera direalisasikan," katanya.

Melalui kegiatan ramah tamah dan silaturahmi ini, ULM dan Pemerintah Kabupaten Tabalong menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi di bidang pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat, sekaligus mendorong pemerataan akses pendidikan tinggi berkualitas melalui rencana PSDKU Fakultas Teknik di Kabupaten Tabalong. (*/dyt/al/ris)



Universitas
LAMBUNG MANGKURAT
Waja Sampai ka Puting



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK



Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

Opini Dosen /
Mahasiswa

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Radar Banjarmasin

28 Januari 2026

Ekonomi Warga Terdampak Serius Akibat Banjir

BANJARMASIN, BPOST

Awal tahun di Kalsel di-
ringi dengan bencana ban-
jir di beberapa kabupaten
kota. Hal ini berdampak
pada perekonomian da-
erah karena masyarakat
susah berusaha. Tentunya
diperlukan langkah-lang-
kah agar ekonomi bisa te-
tap berjalan dan bertum-
buh.

Dr Ahmad Yunani SE
MM, pengamat ekonomi
yang juga Dekan FEB ULM
memaparkan, bencana
alam di Kalsel sangat ber-
pengaruh terhadap pereko-
nomian Kalsel, dampaknya
terasa terutama bagi ma-
syarakat bawah.

"Banjir antara lain me-
landa beberapa kawasan
di Kabupaten Hulu Sungai
Utara, Kabupaten Banjar
dan Kabupaten Batola. Ba-
nyak sawah terendam, pe-
tani gagal panen dan meng-
ganggu kualitas tanah," ka-
tanya pada Gathering Awal
Tahun 2026 yang digelar
Kadin Kalsel, di RM Pawon
Tiga, Handi Bakti, Batola,
Rabu (28/1).

Pada diskusi bertema
Melihat Ekonomi 2026
dan Solusi Ekologi untuk
Menghindari Bencana di
Kalimantan Selatan, Yu-
nani juga memaparkan,
secara jangka panjang
produktivitas pertanian
menurun.

"Demikian pula perikan-
an, banyak keramba ha-
ryut. Jadi perikanan, per-
tanian tanaman pangan
dan hortikultura terdam-
pak," katanya.

Dengan menurunnya

- STORY HIGHLIGHTS**
- Awal tahun di Kalsel di-
ringi dengan bencana ban-
jir di beberapa kabu-
pa-
pa kabupaten kota
 - Perekonomian daerah sangat terdampak
 - Bencana alam di Kalsel sangat berpengaruh terhadap pereko-
nomian warga
 - Pemberdayaan UMKM jadi motor penggerak konsumsi dalam
negeri hingga 57 persen

daya beli masyarakat maka
turun sektor perdagangan
juga turun, berikut pula
jasa lainnya.

Hadir pula pada kegat-
an tersebut narasumber
lainnya yaitu Kepala Dinas
Lingkungan Hidup, Kali-
mantan Selatan, Direktur
Eksekutif Walhi Kaliman-
tan Selatan dan Pengamat
Tata Ruang Kalimantan Se-
latan, Eng Akbar Rahman
ST MT.

Peserta kegiatan terdi-
ri pengurus dan anggota
Kadin Kalsel, asosiasi dan
himpunan, pelaku usaha,
akademisi, serta pemangku
kepentingan terkait.

Disampaikan Hj. Shinta
Laksmi Dewi, Ketua Kadin
Kalsel, dalam diskusi ini
mereka melihat prospek
ekonomi tahun ini setelah
tahun lalu cukup meng-
gembirakan.

"Alhamdulillah, kami me-
nutup 2025 dengan angka
pertumbuhan ekonomi di
Kalsel 5,2 persen, harap-
an kami semua pada 2026
mengawali dengan ekonomi
terus bertumbuh," jela-
snya.

Kadin Kalsel menegas-
kan, berupaya mengawal

pertumbuhan ekonomi se-
uring kebijakan pemerin-
tah.

"Kalau dulu infrastruk-
tur berperan dalam pe-
ningkatan PAD, saat ini
sektor MBG cukup kuat
menggerakan PAD di Kal-
sel, dan kami berharap ke-
bencanaan tidak berulang,
supaya kami bisa dapat
kekutan di 2026 ini," te-
gasnya.

Menjelang Ramadan
dan Syawal, kata Shinta,
langkah dilakukan adalah
pemberdayaan UMKM yang
menjadi motor penggerak
konsumsi dalam negeri
hingga 57 persen untuk
PAD.

Dikatakan Shinta, jadi
tujuan kegiatan ini meng-
analisis proyeksi dan tan-
tangan ekonomi Kalsel
2026.

Mengkaji dampak kebi-
jakan ekonomi dan pem-
angunan terhadap ling-
kungan hidup. Merumus-
kan solusi ekologis dan
tata ruang berkelanjutan
untuk mitigasi bencana.
Mendorong sinergi dunia
usaha, pemerintah, aka-
demisi, dan masyarakat
stpl. (daa)



Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

Opini Dosen /
Mahasiswa

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Radar Banjarmasin

29 Januari 2026

Ketika Hujan Ekstrem dan Alam Kehilangan Penyangga

DALAM beberapa tahun terakhir, Indonesia menghadapi peningkatan bencana hidrometeorologi, seperti banjir, longsor, dan kekeringan ekstrem. Fenomena ini kerap dikaitkan dengan perubahan iklim global, terutama meningkatnya frekuensi dan intensitas hujan ekstrem akibat pemanasan suhu bumi.

Perubahan iklim memang berperan sebagai pemicu meningkatnya intensitas hujan dan ketidakpastian musim. Pola hujan yang dahulu relatif merata kini berubah menjadi hujan bertintensitas tinggi dalam durasi singkat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat bahwa curah hujan harian yang memicu banjir besar di Sumatera pada akhir November lalu secara rata-rata curah hujan selama satu bulan. Kondisi ini membuat daratan tidak mampu menyerap air hujan, sementara sungai kehilangan kemampuan untuk menyalurkan aliran secara bertahap. Akibatnya, berbagai infrastruktur, permukiman, serta vegetasi hanyut terbawa arus, menimbulkan kerusakan yang masif.

Namun, menjelaskan bencana hidrometeorologi semata-mata sebagai akibat perubahan iklim berarti menyederhanakan persoalan yang sesungguhnya jauh lebih kompleks. Besarnya dampak hujan terhadap banjir dan longsor sangat ditentukan oleh kondisi fisik wilayah, khususnya tata guna lahan. Di sinilah akar persoalan bencana hidrometeorologi di Indonesia perlu dicermati

secara lebih mendalam.

Sebagai negara dengan kawasan hutan tropis yang luas, Indonesia seharusnya memiliki daya serap air yang tinggi. Hutan berfungsi sebagai pengatur siklus hidrologi alami menahan air hujan, meningkatkan infiltrasi, mengurangi limpasan permukaan, serta menjaga ketersediaan air tanah. Sayangnya, dalam beberapa dekade terakhir, fungsi ekologis tersebut mengalami degradasi serius akibat pembalakan hutan, alih fungsi lahan menjadi perkebunan skala besar, serta aktivitas pertambangan terbuka.

Perubahan tata guna lahan ini secara langsung mengubah sistem hidrologi suatu wilayah. Salah satu indikator teknis yang dapat menjelaskan perubahan tersebut adalah koefisien limpasan permukaan (*runoff coefficient*). Koefisien ini menunjukkan proporsi air hujan yang langsung mengalir di permukaan tanah dibandingkan dengan yang meresap ke dalam tanah. Semakin besar nilainya, semakin tinggi potensi terjadinya banjir.

Pada kawasan hutan alami atau hutan lebat, koefisien limpasan umumnya berada pada kisaran 0,05-0,20. Artinya, hanya sebagian kecil air hujan yang menjadi aliran permukaan, sementara sisanya terserap oleh tanah dan vegetasi. Pada hutan sekunder, nilainya meningkat menjadi sekitar 0,15-0,30. Namun, ketika hutan dialihfungsikan menjadi perkebunan monokultur (seperti perkebunan kelapa



Oleh
FATIMAH JUHRA*

sawit) koefisien limpasan melonjak ke kisaran 0,30-0,50. Kondisi menjadi jauh lebih kritis pada lahan terbuka bekas tambang atau kawasan terbanjir, di mana nilai koefisien limpasan dapat mencapai 0,60-0,90.

Secara sederhana, jika terjadi hujan dengan volume 1.000 liter air yang jatuh, maka di kawasan hutan alami hanya sekitar 200 liter yang mengalir di permukaan. Sebaliknya, pada lahan perkebunan, limpasan permukaan dapat mencapai sekitar 500 liter, dan pada kawasan pertambangan terbuka jumlahnya dapat melonjak hingga sekitar 900 liter. Perbedaan ini menunjukkan betapa besar pengaruh perubahan tutupan lahan terhadap perilaku air hujan.

Bayangkan jika curah hujan ekstrem yang seharusnya tersebar selama satu bulan justru "ditumpahkan" dalam satu hari. Pada saat yang sama,

kemampuan lahan untuk menyerap air telah menurun drastis akibat alih fungsi hutan menjadi perkebunan dan pertambangan. Dalam kondisi seperti ini, alam tidak lagi mampu menahan, menyimpan, dan mengalirkan air secara bertahap. Air hujan dalam volume besar akan langsung berubah menjadi limpasan permukaan, mengalir cepat ke sungai, meningkatkan debit puncak secara tiba-tiba, dan pada akhirnya memicu banjir serta longsor di berbagai wilayah.

Dampak dari peningkatan limpasan permukaan tidak berhenti pada banjir. Aliran permukaan yang kuat mempercepat proses erosi tanah, terutama di wilayah hulu dan daerah berlereng. Material hasil erosi kemudian terangkut ke sungai, menyebabkan sedimentasi dan pendangkalan. Sungai yang dangkal kehilangan kapasitas dayaampungnya, sehingga semakin rentan meluap pada peristiwa hujan berikutnya. Dalam jangka panjang, kondisi ini menciptakan lingkaran setan bencana hidrometeorologi yang sulit diputus. Dengan kata lain, perubahan iklim berperan sebagai pengali risiko, sementara perubahan tata guna lahan menjadi faktor penguat utama dampak bencana.

Sayangnya, kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia masih cenderung bersifat reaktif dan berfokus pada wilayah hulu seperti pembangunan tanggul, normalisasi sungai, atau relokasi sementara korban banjir. Upaya-upaya tersebut memang penting, tetapi

tidak akan efektif tanpa pembenahan di sektor hulu, yakni tata guna lahan dan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS).

Pendekatan adaptasi perubahan iklim seharusnya diintegrasikan dengan kebijakan tata ruang dan perlindungan lingkungan. Pengetatan izin alih fungsi lahan di kawasan hulu, restorasi hutan dan lahan kritis, serta rehabilitasi DAS perlu menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan.

Kalimantan Selatan perlu bersiap menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi yang kian nyata. Banjir yang terjadi di Kabupaten Balangan merupakan peringatan awal bahwa bencana berskala besar, seperti yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, sangat mungkin terjadi di daerah kita. Terlebih, pola alih fungsi lahan di Kalimantan Selatan menunjukkan kemiripan yang kuat, ditandai oleh dominasi perubahan tutupan lahan menjadi kawasan pertambangan dan perkebunan monokultur, yang secara signifikan menurunkan daya dukung hidrologi wilayah.

Tanpa keberanian untuk membenahi tata guna lahan secara serius, bencana hidrometeorologi akan terus berulang, bahkan dengan intensitas yang semakin besar. Hujan ekstrem mungkin tidak dapat kita kendalikan, tetapi cara kita mengelola hutan, lahan, dan ruang hidup sepenuhnya merupakan pilihan kebijakan yang berada di tangan kita. (*/al/ram)

Dosen Teknik Lingkungan ULM



Universitas
LAMBUNG MANGKURAT
Waja Sampai ka Puting



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK



Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

Opini Dosen /
Mahasiswa

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Radar Banjarmasin

29 Januari 2026

Optimis Ekonomi Kalsel Membaik di 2026

BANJARMASIN - Di tengah musibah banjir yang hampir melanda semua daerah di Kalsel, ada secercah harapan untuk ekonomi Kalsel ditahun 2026 ini. Hal ini terungkap pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kalsel di Pawon Tlogo, Handil Bakti, Kabupaten Barito Kuala, Rabu (28/1).

FGD tersebut menghadirkan Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalsel, Adhi Maulana dan Dekan Fakultas

Ekonomi Bisnis Universitas Lambung Mangkurat (FEB ULM), Dr Yunani SE MSI. Kemudian, Direktur Eksekutif WALHI Kalsel, Raden Rafiq Sepdian dan Pengamat Tata Ruang Kalsel, Eng Akbar Rahman ST MT.

Diungkapkan Ketua Kadin Kalsel, Shinta Laksmi Dewi kegiatan ini untuk memprediksi perkembangan ekonomi Kalsel 2026 dan solusi ekologi untuk menghindari bencana di Kalsel. "Tahun 2025 ditutup dengan pertumbuhan ekonomi Kalsel sebesar 5,2 persen, tentunya

kami berharap pertumbuhan ekonomi Kalsel di 2026 bisa lebih besar dari 5,2 persen," ungkapnya.

Diungkapkan Dewi, Kadin Kalsel terus berupaya turut berperan mengawal pertumbuhan ekonomi Kalsel menuju arah yang semakin membaik. "Kami melihat masih ada peluang untuk peningkatan ekonomi. Seperti sektor infrastruktur dan sektor MBG yang sekarang jadi salah satu penggerak ekonomi daerah," pungkasnya. (sya/gr/oza)



PENGUSAHA: Kadin Kalsel optimis ekonomi Kalsel bisa lebih baik di 2026.



Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

Opini Dosen /
Mahasiswa

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Radar Banjarmasin

30 Januari 2026

Transaksi Emas Tembus Rp 8,8 Triliun

BANJARMASIN, BPOST - Prediksi bahwa harga emas akan mencapai Rp 3 juta, ternyata terbukti, sebagaimana pada pasar perdagangan emas Antam, Kamis (29/1).

Nardi, reseller emas batangan Antam di Jalan Pramuka, Banjarmasin, mengatakan, dari Web emas

antam pada Kamis (29/1), harganya sudah tembus Rp 3.165.000 per gram.

"Untuk harga buy-back atau jual kembali Rp 2.989.000 per gram. Terjadi perubahan harga Rp 135.000 per @gram," jelas Nardi.

Untuk harga jual akan menyesuaikan pasaran. Di-

paparkan pengamat ekonomi, Dr Ahmad Yunani SE MM, memang emas itu diprediksi setiap saat meningkat harganya, secara gradual terus naik.

"Emas adalah komoditi. Di Indonesia dengan semakin banyaknya orang khawatir adanya penurunan rupiah terhadap valuta asing, maka

STORY HIGHLIGHTS

- Prediksi harga emas akan mencapai Rp 3 juta. Bahkan lebih, ternyata sangat terbukti
- Dari Web emas antam, Kamis (29/1), harga tercatat Rp 3.165.000 per gram
- Emas menjadi pilihan tepat berinvestasi

si geopolitik dunia dapat memengaruhi geoeкономи. Jadi bagi yang memiliki cadangan emas banyak seperti halnya Amerika Serikat, mereka diuntungkan.

Sementara, PT Pegadaian mencatatkan kinerja transaksi emas yang positif sejak awal Januari 2026 hingga Rabu (28/1). Lonjakan minat masyarakat terhadap emas terlihat dari pertumbuhan signifikan pada produk Tabungan Emas maupun Cicil Emas.

Untuk pembelian emas fisik secara digital melalui Tabungan Emas oleh nasabah sudah mencapai lebih dari Rp 5 triliun atau tumbuh 53 persen month to date (MtD).

Pembelian emas fisik melalui skema Cicil Emas telah mencapai omzet lebih dari Rp 3,5 triliun dan tumbuh sebesar 41,7 persen MtD.

Kepala Divisi Bisnis Bullion Pegadaian, Kadek

Eva Suputra menegaskan, tingginya harga emas saat ini mendorong masyarakat untuk semakin tertarik menjadikan emas sebagai aset lindung nilai yang aman.

"Emas semakin dilirik untuk menjadi pilihan utama sebagai aset lindung nilai yang aman untuk masa depan," ujarnya, Kamis (29/1).

Kadek juga memprediksi peningkatan transaksi emas akan terus tumbuh seiring naiknya harga emas.

Kinerja positif ini sejalan dengan capaian bisnis bullion Pegadaian sepanjang tahun 2025 yang juga menunjukkan tren menggemblirakan. Total kelolaan emas Pegadaian tercatat mencapai 33,7 ton.

Angka tersebut mencakup berbagai layanan bullion, mulai dari Tabungan Emas, Deposito Emas, Pinjaman Modal Kerja Emas, Trading

Emas, hingga jasa titipan korporasi.

Dari sisi jumlah pengguna, Pegadaian telah melayani sekitar 5 juta nasabah di segmen emas. Tingginya antusiasme masyarakat juga tercermin dari aktivitas transaksi melalui aplikasi digital Pegadaian, TRING.

Lonjakan akses nasabah bahkan sempat membuat Pegadaian melakukan penutupan sementara layanan pembelian Tabungan Emas pada Kamis (29/1) untuk peningkatan kapasitas sistem. "Penutupan transaksi hanya berlangsung sekitar 30 hingga 40 menit," ucapnya.

Meski demikian, layanan kini telah kembali normal dan nasabah sudah dapat melakukan transaksi, khususnya pembelian Tabungan Emas melalui aplikasi TRING. (*dea/Kontan.co.id*)



KEPINGAN EMAS - Seorang karyawan Butik Emas menunjukkan kepingan emas Antam. Dari Web emas antam pada Kamis (29/1), harganya sudah tembus Rp 3.165.000 per gram.